

**KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI BAGI NELAYAN
DI KELURAHAN KANGKUNG, KECAMATAN BUMI WARAS,
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

**ROSTUTI LUSIWATI SITANGGANG
NPM. 2320041016**



**PROGRAM STUDI MAGISTER WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI BAGI NELAYAN DI KELURAHAN KANGKUNG, KECAMATAN BUMI WARAS, KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ROSTUTI LUSIWATI SITANGGANG

Di beberapa wilayah di Indonesia, pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan belum dapat berjalan secara efektif karena mengalami beberapa permasalahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kelembagaan, peran *stakeholders*, dan strategi pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), pengamatan terlibat (*participatory observation*), *Focus Grup Discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Pengambilan sampel wawancara mendalam menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap 12 orang informan kunci. Hasil penelitian diperoleh bahwa BBM subsidi jenis solar dapat diakses pembeliannya lebih mudah dibandingkan dengan BBM Peralite tersedia pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) yang dikelola PT Pertamina dan PT (Aneka Kimia Raya (AKR). Namun akses pembelian solar pun masih terdapat kendala persyaratan administrasi berupa dokumen kapal. *Stakeholder* utama dalam pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan adalah nelayan, SPBN Pertamina, SPBN AKR, dan PT Pertamina Patra Niaga, sedangkan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang (KSOP), dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas adalah pendukung implementasi kebijakan. *Stakeholders* kunci adalah BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, SPBN PT Pertamina dan SPBN PT AKR, yang sangat berperan terhadap keberhasilan pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan. Analisis SWOT menunjukkan bahwa peta strategi terletak pada kuadran I yaitu mendukung strategi agresif. Strategi yang dapat dilakukan pada pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan adalah menggunakan kekuatan (*strengths*) untuk meraih peluang (*opportunity*). DKP Kota Bandar Lampung sudah sangat perlu membangun kemitraan untuk membuka akses pelayanan bagi nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

Kata kunci : BBM subsidi, kebijakan, nelayan, *stakeholder*, SPBN

ABSTRACT

INSTITUTIONS AND STRATEGIES FOR DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FUEL OIL FOR FISHERMEN IN KANGKUNG VILLAGE, BUMI WARAS DISTRICT, BANDAR LAMPUNG CITY

By

ROSTUTI LUSIWATI SITANGGANG

In several regions in Indonesia, the distribution of fuel oil for fishermen has not been able to run effectively because it has experienced several problems. The purpose of this study is to analyze the institutions, roles of stakeholders, and strategies for distributing fuel subsidies for fishermen in Kangkung Village, Bumi Waras District, Bandar Lampung City. Data collection used in-depth interviews, participant observation, Focus Group Discussions, and documentation studies. Sampling of in-depth interviews used purposive sampling techniques for 12 key informants. The results of the study showed that the diesel fuel type of subsidized fuel can be accessed more easily compared to pertalite fuel available at special fuel station for fishermen (SPBN) managed by PT Pertamina and PT AKR. However, access to purchasing diesel fuel still has administrative requirements in the form of ship documents. The main stakeholders in the distribution of fuel subsidies for fishermen are fishermen, SPBN Pertamina, SPBN AKR, and PT Pertamina Patra Niaga, while Mina Jaya Cooperative (KUD), Department of Marine Affairs and Fisheries of Bandar Lampung City (DKP Kota Bandar Lampung), Harbormaster's Office and Class I Port Authority (KSOP), and Downstream Regulatory Agency Committee Oil and Fuel (BPH) are supporters of policy implementation. The key stakeholders are BPH, PT Pertamina Patra Niaga, SPBN PT Pertamina and SPBN PT. AKR. SWOT analysis shows that the strategy map is in quadrant I, which supports an aggressive strategy. DKP Bandar Lampung City really needs to build partnerships to open access to services for fishermen through fuel stations.

Key words : subsidized fuel, policy, fishermen, stakeholders, fuel station

**KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI BAGI NELAYAN
DI KELURAHAN KANGKUNG, KECAMATAN BUMI WARAS,
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ROSTUTI LUSIWATI SITANGGANG

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER WILAYAH PESISIR DAN LAUT**

Pada

**Program Studi Magister Wilayah Pesisir dan Laut
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

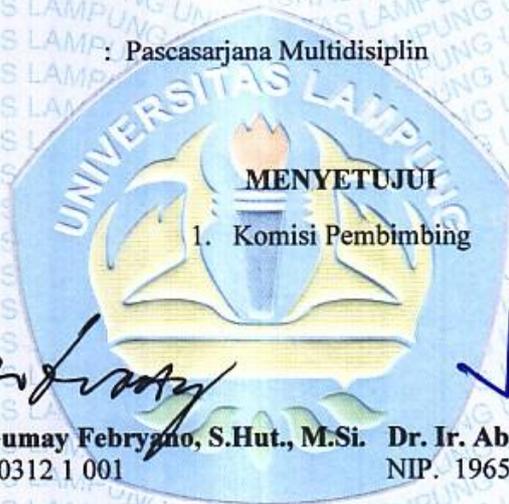
Judul Tesis : KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI
DI KELURAHAN KANGKUNG, KECAMATAN BUMI
WARAS, KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Rostuti Lusiwati Sitanggang

Nomor Pokok Mahasiswa : 2320041016

Program Studi : Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin



Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. NIP. 19740222 200312 1 001

Dr. Ir. Abdulah Aman Damai, M.Si. NIP. 19650501 198902 1 001

2. Ketua Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut
Universitas Lampung

Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19691012 199512 1 001

MENGESAHKAN

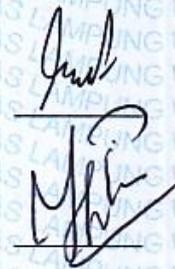
1. Tim Pembimbing

Ketua : Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.

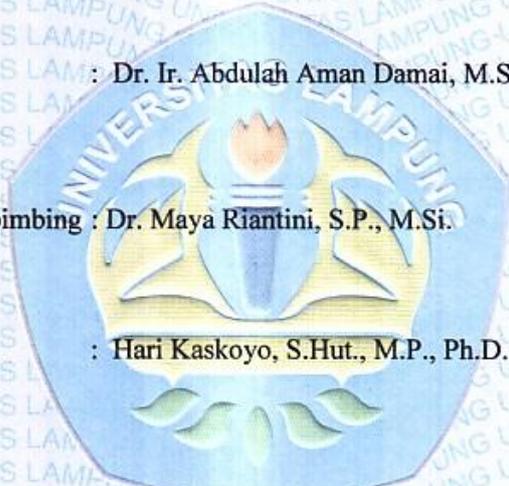


Anggota : Dr. Ir. Abdulah Aman Damai, M.Si.

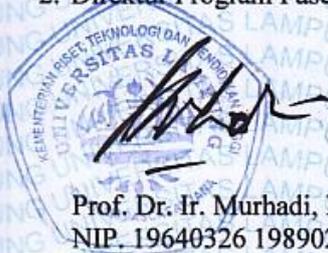
**Penguji
Bukan Pembimbing** : Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.



Anggota : Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.



2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 08 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI BAGI NELAYAN DI KELURAHAN KANGKUNG, KECAMATAN BUMI WARAS, KOTA BANDAR LAMPUNG”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



ROSTUTI LUSIWATI SITANGGANG
NPM 2320041016

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Januari 1976. Penulis adalah anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Wilhem Sitanggung (†) dan Ibu Dungen Hutagalung (†). Penulis menikah dengan Timbul Parlinggoman Situngkir dan memiliki 2 orang anak, Emmanuela Theresia Situngkir dan Bryan Christopher Situngkir.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDS Sejahtera I Kedaton tahun 1988 dan pendidikan menengah pertama diselesaikan pada tahun 1991 di SMPN 1 Tanjungkarang. Pendidikan menengah atas di SMAN Way Halim diselesaikan pada tahun 1994. Penulis melanjutkan pendidikan S1 pada Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1994 dan menyelesaikannya pada tahun 1998.

Penulis bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Barat tahun 2000 sampai 2008, bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2008 sampai 2013, dan tahun 2013 sampai 2018 bertugas di Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Lampung. Penulis menjadi penyuluh Perikanan pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang dari tahun 2018 hingga sekarang.

MOTTO

"Tidak ada gunanya memikirkan mimpi dan lupa untuk
hidup"

(Albus Dumbledore)

"Menghidupkan sebuah mimpi mungkin tidak mudah. Proses
yang dilalui sama pentingnya dengan tujuan yang dicapai"

(Tuti Sitanggang)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepadamu yang selalu ada untukku,

Kedua orangtuaku yang beristirahat di keabadian,

Suamiku tercinta,

Anak-anakku tersayang.

SANWACANA

Syallom Salam Sejahtera,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerahNya yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI BAGI NELAYAN DI KELURAHAN KANGKUNG, KECAMATAN BUMI WARAS, KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Wilayah Pesisir dan Laut atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis;
4. Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku Dosen Pembimbing pertama atas kesabaran, ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis;
5. Dr. Ir. Abdulah Aman Damai, M.S., selaku Dosen Pembimbing kedua atas ilmu, bimbingan, masukan, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis;
6. Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si., selaku Dosen Penguji pertama atas semua masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis;

7. Hari Kaskoyo, Ph.D., selaku Dosen Penguji kedua atas semua masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis;
8. Dr. Indra Gumay Yudha, S.Pi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, motivasi kepada penulis selama ini;
9. Dr. Supono, S.Pi., M.Si. (alm), yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan semasa hidupnya kepada penulis;
10. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, selaku pakar kebijakan publik yang telah memberikan sumbangan pemikiran, pendapat, saran, arahan kepada penulis;
11. Kedua orangtua tercinta, Bapak Wilhem Sitanggang (†) dan Ibu Dungen Hutagalung (†), yang selalu memberikan didikan, kasih sayang, bimbingan dan doa di sepanjang hidup penulis;
12. Suami tercinta, Timbul Parlinggoman Situngkir, atas kesabaran, dukungan, dan motivasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini;
13. Anak-anak tersayang, Emmanuela Theresia Situngkir dan Bryan Christopher Situngkir, atas dukungan dan menjadi penyemangat bagi penulis;
14. Seluruh Dosen Magister Wilayah Pesisir dan Laut Pascasarjana Multidisiplin atas semua ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa;
15. Seluruh penyuluh perikanan Kota Bandar Lampung dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, atas dukungan dan bantuannya selama penulis penelitian dan penyusunan tesis;
16. Teman-teman pascasarjana Magister Wilayah Pesisir dan Laut atas dukungan, doa dan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, Januari 2025

Penulis,

Rostuti Lusiwati Sitanggang

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR MENYETUJUI	v
LEMBAR MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan	1
1.2 Tujuan	6
1.3 Kerangka Pemikiran	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perikanan Tangkap Skala Kecil	8
2.2 BBM Subsidi untuk Nelayan	12
2.3 Kelembagaan.....	16
2.4 Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	18
2.5 Strategi	21
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	24
3.2 Pendekatan Penelitian	25
3.3 Pengumpulan dan Analisis Data	25
3.4 Analisis Data.....	27
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1 Kondisi Geografis	39
4.2 Kondisi Demografi.....	40
4.3 Kondisi Sumber Daya Perikanan	41

V. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Kelembagaan dalam Pendistribusian BBM Subsidi bagi Nelayan	45
5.2 Peran <i>Stakeholder</i> dalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM Subsidi bagi Nelayan	65
5.3 Strategi Pendistribusian BBM Subsidi bagi Nelayan Agar Dapat Dilakukan Secara Tepat	79
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	95
6.1. Kesimpulan	95
6.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman	
1	Prediksi Rata-Rata Kebutuhan dan Pengeluaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Nelayan Skala Kecil di Indonesia Tahun 2015 – 2019	14
2	Perbedaan Lembaga, Organisasi, Individu, dan Institusi.....	16
3	Lembaga dan Perorangan yang Diwawancarai Sebagai Informan Kunci.....	26
4	<i>Ethical Analysis Grid Matrix</i>	29
5	Matriks Analisis SWOT	34
6	Faktor Strategi Internal (IFAS)	36
7	Faktor Strategi Eksternal (EFAS)	37
8	Jumlah Kapal dan Jenis Alat tangkap Penangkapan Ikan di Laut Di Kota Bandar Lampung	42
9	Jumlah Kuota dan Solar Tersalurkan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023	56
10	Sanksi-Sanksi yang Diberlakukan terhadap Pelanggaran Mekanisme Penyediaan, dan Pemanfaatan Pendistribusian BBM Subsidi bagi Nelayan	63
11	<i>Stakeholder</i> yang Terlibat dalam Pendistribusian BBM Subsidi bagi Nelayan di kelurahan Kangkung	66
12	<i>Ethical Analysis Grid</i>	72
13	Pengawasan Internal Pendistribusian BBM Subsidi bagi Nelayan	75
14	Matriks Analisis <i>Strength, Weakness, Opportunities, and Trearth</i> (SWOT)	85
15	Matriks <i>Internal Factor Analysis Strategy</i> (IFAS)	87
16	Matriks <i>External Factor Analysis Strategy</i> (EFAS)	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur Kerangka Pemikiran Penelitian	7
2. Peta Lokasi Kelurahan Kangkung, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung	24
3. Analisis Data Sistem Pengkodean	28
4. Kuadran <i>Power vs Interest Grid</i>	31
5. Jenis Aktor Dalam Setiap Kuadran	32
6. Grafik Kuadran Strategi pada Analisa SWOT	38
7. Jalur Distribusi BBM dari Produksi ke Konsumen	54
8. Diagram Alur Prosedur Pembuatan E- Pas Kecil	60
9. Skema Kelembagaan Pendistribusian BBM Subsidi untuk Nelayan di Kelurahan Kangkung	62
10. Pengelompokan <i>Stakeholders</i> Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan	77
11. Grafik Kuadran Strategi pada Analisis SWOT	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tujuan, Metodologi, Pengumpulan dan Analisis Data	105
2. Laporan Hasil Pengamatan/Observasi	106
3. Panduan Pertanyaan untuk Nelayan	107
4. Panduan Pertanyaan untuk KUD Mina Jaya.....	108
5. Panduan Pertanyaan untuk PT Pertamina Patra Niaga	109
6. Panduan Pertanyaan untuk Pengelola SPBN PT Pertamina Lempasing	110
7. Panduan Pertanyaan untuk Pengelola SPBN PT AKR Lempasing	111
8. Panduan Pertanyaan untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan Kelas I Panjang	112
9. Panduan Pertanyaan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung	113
10. Kategorisasi Data	114
11. Transkrip, Koding, dan Kategori Data Nelayan 1	116
12. Transkrip, Koding, dan Kategori Data Nelayan 2	119
13. Transkrip, Koding, dan Kategori Data Nelayan 3	123
14. Transkrip, Koding, dan Kategori Data Nelayan 4	126
15. Transkrip, Koding, dan Kategori Data Nelayan 5	128
16. Transkrip, Koding, dan Kategori Data Nelayan 6	130
17. Transkrip, Koding, dan Kategori Data KUD Mina Jaya	133
18. Transkrip, Koding, dan Kategori Data DKP Kota Bandar Lampung .	138
19. Transkrip, Koding, dan Kategori Data Pengelola SPBN PT Pertamina.....	143
20. Transkrip, Koding, dan Kategori Data Manager SPBN PT AKR	152

21. Transkrip, Koding, dan Kategori Data Kantor KSOP Kelas I Panjang.....	155
22. Transkrip, Koding, dan Kategori Data Nelayan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel.....	158
23. Laporan Pelaksanaan <i>Forum Group Discussion (FGD)</i>	164
24. Kesimpulan Sementara	175
25. Undang-Undang dan Peraturan Penyelenggaraan Pendistribusian BBM Subsidi bagi Nelayan	177
26. Koordinasi Pengawasan Eksternal Pendistribusian BBM Subsidi ..	180
27. Dokumentasi Pengumpulan Data Penelitian	183

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Usaha penangkapan ikan terutama yang dilakukan oleh nelayan kecil menghadapi banyak tantangan yang signifikan. Selain dari ketertinggalan penguasaan teknologi, sarana usaha juga menjadi keterbatasan berkembangnya usaha nelayan, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak. Bagi nelayan, Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komponen utama yang sangat menentukan dapat berjalan atau tidaknya usaha penangkapan ikan. Di Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu, komponen biaya BBM mencapai 70% dari total biaya operasional (Yuliarti *et al.*, 2023), sedangkan di Soropia Kabupaten Konawe besarnya biaya pembelian BBM 70% - 80% dari keseluruhan biaya operasional nelayan dengan jenis mesin yang bervariasi sebagai pendorong dan penarik jaring (Prianto, 2021). Fadhillah dan Thahir (2022) memperkuat hal ini dengan mengatakan jumlah biaya dari bahan bakar yang diperlukan, ditentukan oleh kapasitas kapal dan mesin kapal, jarak yang ditempuh ke daerah tangkapan, serta lamanya waktu melaut serta jenis alat tangkap yang digunakan, sehingga jumlah kebutuhan BBM setiap nelayan berbeda-beda.

Fenomena sulit terpenuhinya kebutuhan BBM bagi kapal perikanan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena BBM subsidi yang disediakan bagi nelayan tidak mudah untuk diperoleh atau diakses. Priyanto (2021) dalam risetnya melaporkan hak nelayan dalam bentuk subsidi BBM belum dapat dinikmati oleh nelayan di Soropia, Konawe, Sulawesi Tenggara. Dengan adanya BBM subsidi mestinya akan sangat membantu meringankan beban biaya operasional dalam aktivitas melaut dan dipastikan

meningkatkan pendapatan nelayan. Sebagai contoh, di Kota Medan bahwa dengan mengakses solar subsidi nelayan dapat menghemat biaya operasional sebanyak 27%. Dengan perkataan lain bahwa dengan adanya BBM subsidi, pendapatan nelayan dapat meningkat sebesar 27% jika dibandingkan nelayan yang menggunakan BBM non subsidi (Wulandari *et al.*, 2023). Selain adanya kesulitan memperoleh BBM, Veronica (2023) melaporkan hasil penelitiannya, bahwa pendapatan nelayan di Dusun Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus menurun dengan adanya peningkatan harga BBM subsidi bagi usaha nelayan. Dengan demikian, membuktikan BBM sangat berkorelasi dengan pendapatan nelayan.

Keterbatasan nelayan dalam mengakses BBM subsidi di beberapa lokasi di Indonesia disebabkan oleh adanya jumlah kuota BBM subsidi yang tidak mencukupi, lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) yang jauh dari sentra nelayan, dan mekanisme penyaluran yang sulit untuk dipenuhi oleh nelayan (Prianto, 2021). Kesulitan dalam membeli BBM Subsidi karena lokasi SPBN yang tidak strategis ini dialami oleh nelayan Kecamatan Soropia, Kab. Konawe. Nelayan Soropia umumnya mendaratkan hasil penangkapannya di pelabuhan, namun di sekitar pelabuhan tidak terdapat SPBN. SPBN terdapat di Kecamatan Unaaha yang secara geografis letaknya jauh dari Soropia. Kesulitan akses pembelian BBM subsidi dialami juga oleh nelayan Kota Medan, terutama yang memiliki kapal ≤ 5 GT dikarenakan tidak memiliki dokumen kapal dan perijinan sesuai persyaratan (Wulandari, 2023). Selain kasus tersebut, hasil surveil di Tambak Lorok Kota Semarang tidak adanya pengajuan penambahan kuota BBM subsidi untuk nelayan menyebabkan hanya sebagian saja yang dapat terpenuhi kebutuhan BBM untuk operasionalnya (Hasly dan Setiawan, 2022).

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pada pasal 8 ayat 2 tercantum bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam pada pasal 24 tercantum bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada nelayan secara tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat jumlah. Adanya BBM subsidi merupakan salah satu upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap usaha nelayan.

Adapun yang dimaksud BBM subsidi adalah BBM yang pembeliannya disubsidi pemerintah dari dana APBN dengan jumlah kuota yang terbatas dan hanya diberikan kepada konsumen tertentu. Konsumen sektor perikanan yang berhak untuk mendapatkan BBM Subsidi tercantum di dalam Peraturan Presiden No 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak. Khusus untuk konsumen usaha perikanan, yang berhak mengakses BBM Subsidi Jenis Bahan bakar Tertentu (JBT) tersebut mencakup pembudidaya ikan dan nelayan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 06 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu, bahwa, BBM JBT diperuntukkan bagi kapal nelayan pemakaian maksimal 25 KL/bulan, data terverifikasi pada kementerian Kelautan dan Perikanan maupun SKPD provinsi atau kabupaten dan kota yang membidangi.

Adanya peraturan dan ketentuan yang diberlakukan untuk pemanfaatan BBM subsidi menunjukkan bahwa kelembagaan memainkan peran penting dalam tata kelola pendistribusian BBM subsidi secara tepat. Pemerintah menyusun kebijakan untuk menjadi pedoman aturan main dalam mengatur pendistribusian BBM subsidi, berupa undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, bahkan ketentuan teknis pelaksanaan di lapangan. Tujuannya adalah supaya BBM subsidi ini sampai kepada konsumen pengguna yang berhak dengan terkendali. Risi (2019) mengemukakan peran pemerintah sangat besar di dalam kelembagaan. Kapasitas pemerintah untuk bertindak didasarkan pada tiga “pilar” pelebagaan

yang diidentifikasi oleh (Scott, 1995): regulatif, normatif, dan kognitif. Dari sudut pandang pilar regulatif, pemerintah mempunyai kapasitas untuk menentukan aturan main dengan membuat undang-undang dan peraturan lainnya. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Ostrom (2011) bahwa semua aturan ditujukan untuk mencapai ketertiban dan prediktabilitas dengan memposisikan untuk mengambil tindakan sehubungan dengan yang diperlukan, diizinkan, atau dilarang.

Implementasi kelembagaan dalam pendistribusian BBM subsidi tak terlepas dari keterlibatan stakeholder atau para pemangku kepentingan yang memiliki peran dan tugas masing-masing. Perspektif pemangku kebijakan dapat dilihat dari kepentingan serta pengaruh untuk mengontrol, mengendalikan, mengubah, atau menghambat sebuah keputusan (Fletcher dalam Maani *et. al* (2021). Pendistribusian BBM subsidi merupakan proses panjang yang tentu saja tidak dapat ditangani oleh sebuah instansi atau kementerian, atau lembaga tertentu saja. Pemerintah memiliki kapasitas untuk dapat mengendalikan seluruh sistem pendistribusian BBM subsidi melalui kebijakan-kebijakan, karena untuk sampai kepada konsumen pengguna harus melalui prosedur dan berbagai tahapan. Di sini diperlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait lainnya, juga masyarakat nelayan. Hal yang juga sangat penting untuk memastikan agar BBM subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab adalah fungsi pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus hukum penyimpangan BBM subsidi yang menguntungkan pihak tertentu.

Untuk menjamin kelancaran semua proses penyaluran BBM subsidi untuk sampai kepada masyarakat yang berhak diperlukan strategi-strategi. Permasalahan BBM subsidi yang masih sulit diakses oleh nelayan mungkin disebabkan oleh aturan main yang kurang tepat atau sulit dipenuhi. Namun di sisi lain, pemerintah harus dapat mengantisipasi kerugian dalam proses distribusi, sistem pengangkutan, dan penyediaan pasokan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Agar BBM subsidi dapat terdistribusi merata kepada nelayan yang berhak, pemerintah harus dapat

mengembangkan strategi yang efektif dan dapat diimplementasikan oleh semua stakeholder, sehingga amanat undang-undang perlindungan nelayan dapat terealisasi. Kaya dan Sajriawati (2023) menjelaskan bahwa salah satu opsi yang dapat diterapkan ketika merumuskan kebijakan adalah dengan memasukkan sudut pandang para nelayan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan agar kebijakan yang diambil dapat mendukung usaha kegiatan atau aktivitas nelayan.

Salah satu wilayah yang menyediakan sarana pendistribusian BBM Subsidi bagi nelayan yaitu Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki 2 (dua) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) yang keduanya berlokasi di Lempasing, Kelurahan Way Tataan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Adapun Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras merupakan wilayah salah satu kelurahan yang terletak di pesisir. Nelayan Kelurahan Kangkung yang terdaftar pada laman satudata.kkp.go.id pada tahun 2023 berjumlah 709 orang, yang terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan buruh (ABK). Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung yang berprofesi sebagai nelayan terkonsentrasi di Kelurahan Kangkung, khususnya di Gudang Lelang. Selain itu, di Kelurahan Kangkung terdapat pula aktivitas pelelangan ikan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gudang Lelang yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan KUD Mina Jaya. Kapal-kapal nelayan banyak berlabuh di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gudang Lelang baik yang mengikuti proses lelang ataupun tidak. Nelayan-nelayan ini sebagian besar melakukan pengisian BBM di SPBN Lempasing. Permasalahan nelayan yang pernah ditemukan terkait BBM subsidi terkhususnya di Kota Bandar Lampung yaitu kelangkaan bahan bakar solar dan keterbatasan akses bahan bakar solar dan pertalite karena adanya kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan usaha nelayan, sehingga diperlukan penelitian lebih mendalam untuk menemukan solusi terbaik bagi keberlanjutan usaha nelayan. Fadhillah dan Thahir (2022) mengemukakan kendala nelayan yang tidak memiliki dokumen kapal menyebabkan kebutuhan jumlah BBM tidak dapat ditentukan. Beberapa persyaratan administrasi diperlukan dalam pembuatan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka peneliti ingin mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan pendistribusian BBM Subsidi di Kelurahan Kangkung, Kota Bandar Lampung yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kelembagaan dalam pendistribusian BBM Subsidi untuk nelayan Kelurahan Kangkung, Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah peran pemangku kepentingan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM Subsidi nelayan di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung?
- c. Bagaimanakah strategi agar BBM Subsidi bagi nelayan di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung dapat didistribusikan secara tepat?

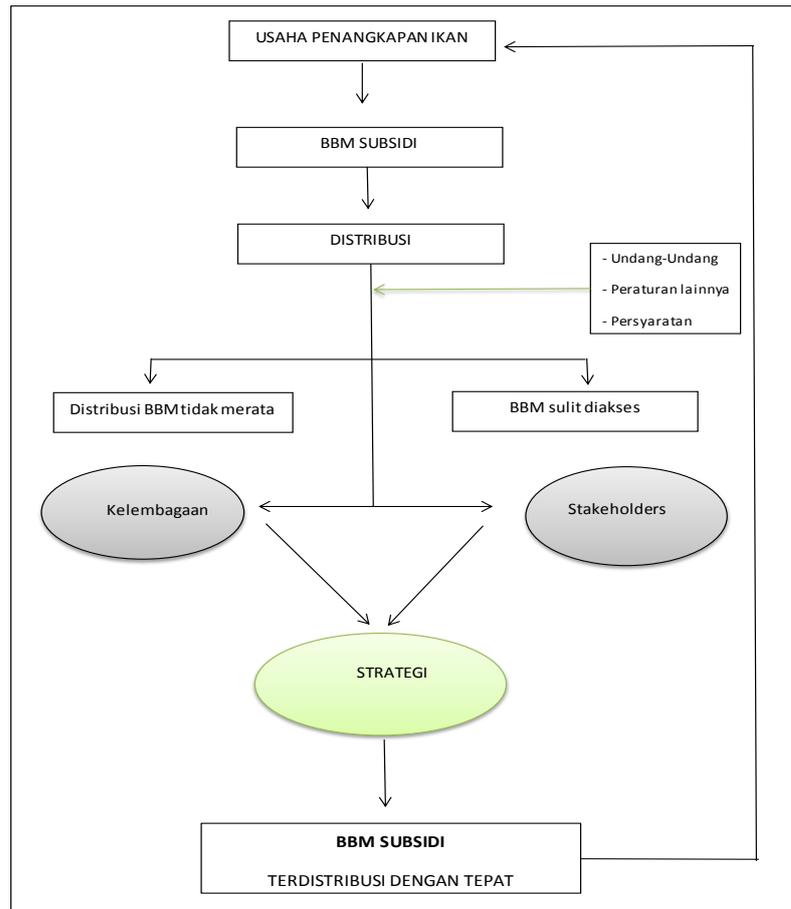
1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan, seperti diuraikan sebagai berikut :

- a. Menganalisis kelembagaan dalam pendistribusian BBM Subsidi bagi nelayan di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.
- b. Menganalisis peran pemangku kepentingan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM Subsidi untuk nelayan di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.
- c. Merumuskan strategi pendistribusian BBM Subsidi bagi nelayan di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung agar dapat dilakukan secara tepat.

1.3. Kerangka Pemikiran

Salah satu kendala usaha nelayan adalah sulitnya mengakses BBM subsidi yang disediakan pemerintah untuk mendukung usahanya. Hal ini menjadi kendala, mengingat BBM merupakan komponen utama yang mendominasi biaya operasional nelayan sebesar 60% – 80% dari total biaya.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam hal ini, peran kelembagaan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah sangat menentukan ketepatan distribusi BBM subsidi dan kemudahan akses bagi nelayan. Demikian pula keterlibatan dari stakeholder atau pemangku kepentingan, memberikan dampak yang besar terhadap berjalan atau tidaknya sistem pendistribusian BBM subsidi. Sebab itu, untuk mengatasi kendala masih tidak meratanya akses BBM subsidi kepada nelayan, diperlukan strategi yang efektif dan efisien, serta dapat mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan dalam pendistribusian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perikanan Tangkap Skala Kecil

Glosarium Perikanan FAO mendefinisikan perikanan skala kecil sebagai usaha perikanan tradisional yang dilakukan oleh rumah tangga nelayan (bukan perusahaan tradisional) menggunakan modal yang relatif kecil, menggunakan armada berkapasitas rendah, trip penangkapan yang singkat, umumnya tidak terlalu jauh dari pantai, dan hasil tangkapan untuk konsumsi lokal (Grati *et al.*, 2022). Selanjutnya Mubyanto dalam Husni dan Nursan (2023) menjabarkan karakteristik usaha nelayan, yaitu (1) Pendapatan bersifat harian yang besarnya bergantung kepada musim dan status nelayan. (2) Tingkat pendidikan keluarga nelayan umumnya rendah. (3) Produk yang dihasilkan cenderung berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar, sifat produk cepat mengalami kerusakan sehingga nelayan sangat bergantung kepada pedagang. (4) Resiko usaha tergolong tinggi dengan nilai investasi yang besar. Sistem bagi hasil ABK dengan pemilik kapal lebih menguntungkan pemilik kapal.

Falah dan Aptasari (2023) menjelaskan karena tingkat pendidikannya yang rendah, nelayan dinilai tidak pintar, tidak mempunyai kemampuan bekerja dengan efisien dan tidak mampu merencanakan masa depannya. Kondisi ini tidak berubah banyak dari tahun ke tahun. Data Direktorat Sekolah dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menunjukkan 80% nelayan kecil hanya berpendidikan di bawah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan tingkat pendidikan yang rendah, tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan pengelolaan usaha perikanan.

Darma *et al.* (2020) memberikan informasi dalam data tahun 2015 – 2019, sebanyak 83% nelayan di Indonesia berada dalam kemiskinan dengan metode penangkapan ikan masih tradisional. Armada penangkapan sebanyak 64% tidak bermotor, 21% menggunakan motor tempel, dan kapal motor hanya 15%. Jumlah hasil penangkapan ikan yang sedikit hanya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Penerimaan usaha perikanan tangkap di Indonesia paling besar didapatkan oleh nelayan skala besar dengan ukuran kapal 100 – 200 GT yaitu sebanyak 3,5 milyar pertahun dengan laba yang diterima mencapai 2,058 milyar per tahun. Sedangkan penerimaan paling kecil diterima oleh nelayan skala kecil yaitu sebesar 97 juta per tahun dengan perhitungan R/C 1,31 – 1,42. Fakta ini mengungkapkan ketimpangan yang sangat jauh antara nelayan skala kecil dan besar.

Perikanan skala kecil sebagian besar beroperasi di wilayah pesisir, dan nelayan mungkin harus bersaing untuk mendapatkan ruang dan sumberdaya dengan pelaku usaha lainnya seperti pembudidaya ikan, industri produksi energi lepas pantai, transportasi laut, dan sektor wisata. Ini merupakan sebuah situasi yang dapat mengarah pada 'perampasan laut' sehingga nelayan skala kecil berisiko kehilangan hak mereka untuk mengakses atau menggunakan ruang atau sumber daya laut. Perencanaan Tata Ruang Laut (MSP), adalah sebuah pendekatan yang terkoordinasi, terintegrasi dan lintas batas untuk pemanfaatan ruang maritim. Perencanaan Tata Ruang Laut ini diharapkan dapat meminimalisir dan menghindari terjadinya konflik (Grati *et al.*, 2022).

Kriteria nelayan kecil menurut hukum dijelaskan oleh Pramoda dan Apriliani (2019) yang melakukan kajian terhadap UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, menemukan perbedaan dalam mendefinisikan nelayan kecil. Pada UU No. 45 Tahun tercantum nelayan kecil sebagai orang yang melakukan penangkapan untuk ikan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Sedangkan dalam UU No 7 tahun 2016 tercantum nelayan kecil orang yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT). Berdasarkan kajian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa besaran ukuran kapasitas kapal nelayan kecil adalah ≤ 5 GT. Karena terlebih dahulu diberlakukan, ketentuan yang ada pada UU No. 45 Tahun 2009 seharusnya menjadi pedoman pemerintah dalam penyusunan UU No. 7 Tahun 2016. Dalam kaitannya dengan status hukum kapal dijelaskan dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 163 ayat 2 sebagai berikut:

1. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih.
2. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
3. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Selanjutnya Wulandari *et al.* (2023) menginformasikan bahwa Pas Kecil kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dibutuhkan sebagai syarat untuk memperoleh Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi perikanan di kabupaten/kota.

Menurut Vilasante *et al.* (2021) perikanan skala kecil dan komunitas pesisir yang terkait dengannya sedang menghadapi masa kritis di seluruh dunia. Faktor sosial-ekologis yang mereka derita akibat penangkapan ikan berlebihan, perubahan iklim, polusi, urbanisasi, industrialisasi, dan peningkatan permintaan makanan laut dalam banyak aspek belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mendorong perubahan transformatif baru, harus dapat memanfaatkan peran kunci yang dimiliki beberapa aktor dalam mendorong kepercayaan, kerja sama, dan inovasi sosial. Kurangnya partisipasi nelayan dalam pengambilan keputusan menyebabkan lemahnya pengelolaan perikanan dan hal ini menjelaskan konservasi sumber daya laut.

Kurangnya tata kelola yang efektif merupakan masalah utama dalam perikanan skala kecil. Penerapan tata kelola yang mencakup tiga pilar keberlanjutan (sosial, ekonomi, dan ekologi) masih menjadi tantangan dunia. Hasil penelitian Aguion *et al.* (2021) menempatkan dimensi sosial dalam sorotan tata kelola perikanan skala kecil, karena serangkaian atribut yang terkait dengan sistem pemanfaatan (misalnya, kepemimpinan, kohesi sosial, dan penegakan hukum mandiri) merupakan kunci dalam membedakan antara perikanan berkelanjutan dan tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tidak hanya sekedar fokus pada peraturan teknisnya sendiri, namun yang lebih penting, pada cara peraturan tersebut dibuat. Selanjutnya dikatakan bahwa ketidakberlanjutan dalam perikanan skala kecil berhubungan dengan struktur tata kelola yang tidak memadai.

Picaulima *et al.* (2022) melaporkan bahwa keberlanjutan usaha perikanan skala kecil dipengaruhi oleh aspek ekonomi yaitu keuntungan usaha, pendapatan ABK (bagi nelayan buruh), dan kelayakan investasi. Pendapatan nelayan kecil tidak dapat diprediksi dan selalu fluktuatif. Amarulah *et al.* (2020) menyatakan untuk meningkatkan perekonomian nelayan kecil, dibutuhkan bantuan pemerintah melalui pembinaan dan pengembangan kemampuan nelayan pada aspek pengembangan jaringan pemasaran hasil produksi, penerapan modernisasi teknologi perikanan tangkap yang diimbangi dengan kemampuan operasional, serta pengembangan bantuan permodalan bagi usaha nelayan yang bersumber dari dana perimbangan yang disalurkan melalui lembaga keuangan desa atau perbankan dengan birokrasi yang mudah, memungkinkan untuk diakses oleh nelayan.

Untuk merespon rencana pemerintah tentang kebijakan penangkapan ikan terukur, nelayan skala kecil dengan kapasitas ≤ 10 GT, disyaratkan untuk bergabung dalam koperasi atau asosiasi, karena kuota penangkapan ikan diberikan melalui organisasi tersebut. Pengorganisasian harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Zulham *et al.*,

2022). Penangkapan ikan terukur merupakan rencana kebijakan untuk mendukung kelestarian ekosistem laut untuk masa depan.

2.2. BBM Subsidi untuk Nelayan

Bahan Bakar Minyak Subsidi adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang pembeliannya disubsidi pemerintah dari dana APBN dengan jumlah kuota yang terbatas dan hanya diberikan kepada konsumen tertentu. Konsumen sektor perikanan yang berhak untuk mendapatkan BBM Subsidi diatur oleh pemerintah di dalam Peraturan Presiden No 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak, yang mencakup pembudidaya ikan dan nelayan. Yuliarti *et al.* (2023) mengemukakan dalam Naskah RAPBN dan Nota Keuangan setiap tahunnya, subsidi BBM merupakan alokasi pembiayaan sebagai pembayaran yang diberikan Pemerintah kepada PT Pertamina atas tugasnya menyediakan dan mendistribusikan BBM, karena dalam penyediaan BBM Subsidi PT Pertamina mendapatkan pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya. Pertamina adalah pemegang monopoli terbesar pendistribusian BBM di Indonesia.

Kebijakan BBM subsidi oleh pemerintah dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh akses BBM, namun kebijakan ini mempunyai dampak yang buruk, antara lain menyebabkan beban anggaran yang tinggi pada pemerintah, kerusakan lingkungan, dan distorsi ekonomi harga BBM. Menurut Gobel *et al.* (2024), implementasi kebijakan subsidi bahan bakar fosil adalah cara yang tidak efisien dalam mendistribusikan hasil pengelolaan sumberdaya alam, karena metode ini lebih menguntungkan bagi rumah tangga berpendapatan tinggi dibandingkan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Hal ini diperkuat oleh Yuliarti *et al.* (2023), yang menemukan fakta nelayan kecil dengan ukuran kapal < 5 GT lebih banyak memperoleh bahan bakar solar di atas harga normal karena jarak tempat pendaratan ikan ke stasiun pengisian bahan bakar seperti SPDN, SPBN, atau SPBU yang jauh.

Priyanto (2021) menjelaskan kebijakan harga BBM yang ditetapkan kurang efektif dalam mendukung usaha nelayan. Terdapat beberapa alasan nelayan tidak dapat mengakses BBM subsidi, yaitu:

1. Kuota BBM Subsidi tidak mencukupi kebutuhan nelayan
2. Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) kurang strategis sehingga tidak dapat diakses oleh nelayan yang jauh
3. Mekanisme penyaluran BBM Subsidi, pengurusan ijin usaha nelayan, dan surat rekomendasi dari dinas terkait sulit untuk direalisasikan.

Kebijakan BBM Subsidi yang diterapkan bagi konsumen sektor perikanan dalam kenyataannya belum menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan. Hal ini dijelaskan oleh Wulandari *et al.* (2023) terdapat diskriminasi antara konsumen transportasi dan konsumen sektor perikanan. Bila nelayan dipersyaratkan oleh banyaknya dokumen untuk mengakses BBM Subsidi, konsumen sektor transportasi dapat memperoleh BBM Subsidi tanpa dibebani oleh persyaratan dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKP kendaraan.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh nelayan terkait BBM dijabarkan lebih lanjut oleh Fitria *et al.* (2023) yaitu terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak. Dengan kenaikan harga BBM secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, karena biaya yang dikeluarkan untuk operasional akan semakin tinggi. Sedangkan kelangkaan BBM tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan. Hal ini dapat disebabkan karena persentase kelangkaan BBM di Desa Ketapang Baru Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tergolong kecil atau kelangkaan BBM di lokasi ini jarang terjadi. Sementara Wulandari *et al.* (2023) menginformasikan hasil penelitiannya terhadap nelayan kecil di Kota Medan, bahwa penyebab nelayan tidak dapat mengakses BBM Subsidi adalah karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait tentang persyaratan dan prosedur memperoleh BBM Subsidi dan tidak memiliki dokumen perijinan kapal sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Prasution dan Ma'arif (2019) mengemukakan bahwa besarnya penggunaan bahan bakar minyak dalam usaha perikanan tangkap dikarenakan BBM menjadi pendorong kapal sekaligus penggerak mesin dan ada pula yang digunakan dalam pengawetan dan pengolahan pasca panen di kapal. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk menghemat bahan bakar adalah menerapkan teknik penggunaan sarana prasarana penangkapan ikan yang efisien, menggunakan teknologi pendeteksi pencarian *fishing ground* untuk mengurangi pergerakan kapal mencari target lokasi, mengurangi kecepatan kapal, melakukan operasional penangkapan ikan lebih dari sehari secara berkelompok, serta mempertimbangkan penggunaan trawl menjadi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Selain itu memperbaiki kualitas pembakaran pada motor penggerak dapat mengefesiesikan penggunaan bahan bakar.

Darma *et al.* (2020) mengungkapkan melakukan survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang dampak peningkatan harga BBM dan penghapusan subsidi BBM terhadap pendapatan nelayan kecil di 34 provinsi, bahwa 56,25% responden terdampak oleh kenaikan harga BBM sebagian besar adalah nelayan kecil dengan kapasitas kapal 1 – 10 GT, sedangkan 43,75% nelayan (kecil dan besar) tidak terdampak. Selanjutnya prediksi rata-rata kebutuhan bahan bakar minyak (kilo liter) dan pengeluaran belanja bahan bakar minyak nelayan skala kecil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Prediksi Rata-Rata Kebutuhan dan Pengeluaran Belanja Bahan bakar Minyak (BBM) Nelayan Skala Kecil di Indonesia Tahun 2015 – 2019

Ukuran Kapal	Kebutuhan BBM (Kilo liter / tahun)			Pengeluaran (Rp. Juta / Tahun)		
	Setelah	Sebelum	Selisih	Setelah	Sebelum	Selisih
Perahu Motor Tempel	435.089,00	271.930,60	163.158,40	2.240,70	1.400,40	840,30
Perahu Motor < 5 GT	351.990,00	219.993,80	131.996,20	1.812,70	1.132,90	679,80
Perahu Motor 5 - 10 GT	179.965,00	112.478,10	67.486,90	926,80	579,20	347,60
Perahu Motor 10 - 20 GT	128.502,00	80.313,80	48.188,20	661,70	413,60	248,10
Perahu Motor 20 - 30 GT	112.621,00	70.388,10	42.232,90	579,90	362,40	217,50
Total	1.208.167,00	755.104,40	453.062,60	6.221,80	3.888,50	2.333,30

Sumber: Darma *et al.* (2020)

Untuk membantu menyederhanakan kesulitan dalam pengurusan persyaratan rekomendasi BBM subsidi, pemerintah dapat berinisiatif menggunakan alat bantu digital ataupun aplikasi. Dwitasari dan Kurniawan (2024) menyampaikan hasil penelitiannya bahwa dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, UPTD TPI Kabupaten Purbolinggo memberikan layanan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM Jenis Tertentu, dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Dinas yang berwenang menggunakan alat bantu digital untuk melakukan verifikasi dan penerbitan surat rekomendasi dimaksud secara online. Hal ini lebih mempermudah nelayan dan mempersingkat waktu pembuatan surat rekomendasi. Strategi penyederhanaan pendaftaran dan pemenuhan persyaratan dokumen untuk dapat mengakses BBM Subsidi ini juga selaras dengan yang ditemukan oleh Fadhillah dan Thahir (2022) yaitu sesuai dengan PER.13/MEN/KP/2015, nelayan sebagai konsumen pengguna BBM Jenis Tertentu (Solar) dapat membeli bahan bakar subsidi salah satunya dengan menggunakan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Namun kendala yang ditemukan adalah nelayan tidak memiliki dokumen surat kapal dan tidak dapat menentukan banyaknya jumlah bahan bakar minyak yang diperlukan. Adapun persyaratan pembuatan surat rekomendasi tersebut adalah SIPI, SLO, SPB, SEPP, Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA), serta harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Untuk mempermudah penginputan dan pengelolaan dokumen kapal, data nelayan dan produksi, maka Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan (DKPP) Nagan Raya mengembangkan aplikasi berbasis online sistem rekomendasi BBM Subsidi yang diharapkan juga mempermudah nelayan memperoleh BBM untuk usahanya (Fadhillah dan Thahir, 2022).

2.3. Kelembagaan

Aturan adalah pemahaman bersama diantara pemangku kepentingan yang terlibat, yang merujuk pada ketentuan yang ditegakkan tentang tindakan atau keadaan yang diwajibkan, dilarang, atau diizinkan. Semua aturan adalah hasil upaya implisit atau eksplisit untuk mencapai ketertiban dan prediktabilitas di antara *stakeholders* dengan menciptakan kelas-kelas atau posisi orang yang terlibat yang kemudian diharuskan, diizinkan, atau dilarang untuk mengambil tindakan sehubungan dengan yang diperlukan, diizinkan, atau dilarang. Sedangkan Aturan kerja adalah seperangkat aturan yang akan dijadikan acuan jika diminta untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan mereka. Meskipun mengikuti suatu aturan mungkin menjadi “kebiasaan sosial”, namun hal ini mungkin membuat partisipan sadar akan aturan yang mereka gunakan untuk mengatur hubungan mereka. Individu dapat secara sadar memutuskan untuk mengadopsi aturan yang berbeda dan mengubah perilakunya agar sesuai dengan keputusan tersebut (Ostrom, 2011).

Menurut North (1991), institusi yang efisien secara adaptif merupakan sebuah kondisi yang diperlukan untuk mencapai perubahan ekonomi yang sukses. Namun, kesenjangan antara tingkat pertumbuhan ekonomi antara negara-negara Barat yang kaya dan negara-negara miskin di seluruh dunia menunjukkan bahwa sangat sedikit negara yang berhasil mencapai kerangka kelembagaan yang efisien.

Tabel 2. Perbedaan Lembaga, Organisasi, Individu, dan Institusi

Lembaga	Organisasi	Individu	Institusi
- Dibentuk, berkembang, dan diubah oleh individu	Pemain	- Pemain - Anggota organisasi - Membuat pilihan atau perubahan institusi	- Aturan permainan - Mengatur interaksi sosial

Sumber: North (1991)

Selanjutnya dijelaskan bahwa aturan formal sebagai seperangkat aturan dalam hierarki normatif yang serupa dengan yang ditemukan dalam sistem hukum modern. Peraturan informal menunjukkan bahwa peraturan tersebut berasal dari pikiran individu, namun merupakan cerminan dari kondisi budaya yang berlaku.

Sedangkan menurut Budiharsana dan Heywood (2017) Aturan adalah suatu pernyataan yang mirip dengan norma, tetapi memiliki sanksi tambahan jika tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang dilarang. Situasi ini membutuhkan peraturan, pengawasan, dan sanksi agar peraturan berlaku. Aturan harus dibuat di lokasi pemilihan konstitusional-lokal, regional, nasional, atau internasional. Interaksi dalam lembaga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya bagi individu dan kelompok secara keseluruhan. Selain itu, kebiasaan lokal atau karakteristik masyarakat mempengaruhi kerangka Analisis Pengembangan Kelembagaan (APK). Faktor adat dan ciri-ciri masyarakat membentuk sistem aturan informal yang mengatur dan mendorong perilaku tertentu. Peraturan informal inilah yang memiliki pengaruh besar terhadap mereka yang bekerja di lembaga tersebut, dan pada akhirnya melemahkan kelembagaan.

Pejovich (1999) membagi pembuatan aturan menjadi 2 (dua) yaitu formal dan informal. Aturan informal berasal dari interaksi yang bertahan dan dilembagakan menjadi tradisi, nilai moral, kepercayaan, dan sebagainya. Peraturan informal tidak mempengaruhi kebijakan. Peraturan informal berubah terutama karena pengikisan yang lambat dan memakan waktu. Pembuat undang-undang seperti hakim, birokrat, dan pembuat peraturan lainnya menetapkan, mengubah, dan menetapkan aturan formal. Artinya, aturan formal adalah faktor kebijakan. Pembuat peraturan dapat mengeluarkan peraturan baru untuk mengubah permainan atau sebagai tanggapan terhadap persyaratan permainan.

Dalam penelitian tentang konteks kelembagaan bisnis di masyarakat, digambarkan bahwa pemangku kepentingan dan masyarakat menganggap penting norma dan aturan bisnis yang berlaku. Para pemangku kepentingan yang

terlibat memanfaatkan norma dan aturan untuk menentukan peran, hak, dan tanggung jawab yang tepat di masyarakat. Sedangkan perusahaan menjadikan peraturan ini sebagai pedoman untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Hubungan antar aktor diikat dengan suatu nilai dari struktur kelembagaan. Aktor yang mengidentifikasi nilai-nilai yang tertanam dalam struktur kelembagaan masyarakat akan merasa lebih terhubung dengan struktur tersebut. Meskipun tidak harus dimiliki bersama atau selaras, nilai-nilai sangat penting bagi pemangku kepentingan bisnis dan masyarakat dan memberikan titik acuan umum dalam interaksi bisnis masyarakat. Bagi ahli fenomenologi, kuncinya adalah menjelaskan bagaimana interaksi sosial dapat dipertahankan sepanjang waktu, dan biasanya menekankan proses berjalan. Setiap aktor mengembangkan interpretasi atas perilaku tertentu, dan makna atau nilai tersebut berfungsi untuk membatasi perilaku (Risi, 2022).

Di samping itu, Risi (2019) mengemukakan peran pemerintah sangat besar di dalam kelembagaan. Kapasitas pemerintah untuk bertindak didasarkan pada tiga “pilar” pelebagaan yang diidentifikasi oleh (Scott, 1995): regulatif, normatif, dan kognitif. Dari sudut pandang pilar regulatif, pemerintah mempunyai kapasitas untuk menentukan aturan main dengan membuat undang-undang dan peraturan lainnya. Namun, dalam pilar normatif, pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan legitimasi sosiopolitik, yang merupakan penilaian kesesuaian dengan standar dan prinsip yang berlaku. Pada pilar kognitif, peran pemerintah juga dapat berdampak pada skema klasifikasi yang digunakan untuk memahami dan mengatur dunia sosial.

2.4. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Aktor dapat dianggap sebagai individu tunggal atau sebagai kelompok yang berfungsi sebagai aktor korporasi. Istilah “tindakan” mengacu pada perilaku-perilaku yang mana individu atau kelompok yang bertindak memberikan makna subyektif dan instrumental. Analisis perilaku mikro menggunakan teori atau model implisit atau eksplisit dari para pelaku dalam suatu situasi untuk

mendapatkan kesimpulan tentang kemungkinan perilaku dalam suatu situasi (dan juga tentang pola hasil gabungan yang mungkin dihasilkan). Analisis harus membuat asumsi tentang bagaimana dan apa yang dihargai oleh partisipan; sumber daya, informasi, dan keyakinan yang mereka miliki; apa kemampuan pemrosesan informasinya; dan apa mekanisme internal yang mereka gunakan untuk memutuskan strategi (Ostrom, 2011). Selanjutnya dijelaskan bahwa Seorang aktor dalam suatu situasi tindakan (individu atau perusahaan) mencakup asumsi tentang empat kelompok variabel:

1. Sumber daya yang dibawa oleh seorang aktor ke dalam suatu situasi;
2. Para pelaku penilaian menetapkan negara-negara di dunia dan tindakan-tindakannya;
3. Cara aktor memperoleh, memproses, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan dan informasi;
4. Proses yang digunakan para aktor untuk memilih tindakan tertentu.

Mazigo *and* Hattingh (2020) memuat argumentasi bahwa manusia bukan sekadar wadah masukan sumberdaya dan kepuasan, sebaliknya mereka adalah agen aktif yang menetapkan tujuan mereka sendiri, membuat pilihan sendiri, dan mengejar serta mewujudkan tujuan mereka sendiri sebagai tujuan yang dihargai 'Agen' adalah “seseorang yang bertindak dan membawa perubahan” dan 'agensi' berarti “kebebasan dan kemampuan manusia untuk mengejar tujuan-tujuan yang bernilai dan menghasilkan pencapaian yang mereka anggap berharga. Mengingat kesadaran akan kemandirian agensi, menganjurkan pengaturan sosial yang memungkinkan setiap manusia menjadi 'agen aktif' dan menerapkan 'kebebasan agensi' untuk “mewujudkan pencapaian nilai-nilai tertentu, dan nilai-nilai mana yang harus dicapai. upaya untuk menghasilkan”.

Menurut Fletcher dalam Maani *et al.* (2021), Pemangku kepentingan (stakeholders) didefinisikan sebagai kelompok orang atau lembaga yang memiliki kepentingan, ketertarikan, serta mempengaruhi atau dipengaruhi dalam permasalahan. Selanjutnya dijelaskan bahwa *stakeholders* atau pemangku

kepentingan dapat dibedakan atas dua yaitu *stakeholders* primer atau utama dan *stakeholders* sekunder atau pendukung. Perspektif pemangku kebijakan dapat dilihat dari kepentingan serta pengaruh (power) untuk mengontrol, mengendalikan, mengubah, atau menghambat sebuah keputusan. Freeman (1984) dalam Reed (2009) mendefinisikan *stakeholders* sebagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan, sehingga dalam kebijakan dikenal aktor-aktor yang terpengaruh dan/atau mempengaruhi dalam sebuah keputusan. Dan bila dikaitkan dengan konteks kebijakan publik, maka *stakeholders* adalah pihak yang terpengaruh dan/atau mempengaruhi sebuah kebijakan publik.

Mazigo and Hattingh (2020) menegaskan bahwa kemampuan individu dipengaruhi positif atau negatif oleh tindakan atau kelambanan “berbagai institusi sosial – terkait dengan operasi pasar, administrasi, badan legislatif, partai politik, organisasi non-pemerintah, lembaga peradilan, dan lembaga peradilan, media dan masyarakat pada umumnya.” Dengan memperhatikan peran yang dimainkan lembaga-lembaga sosial dalam meningkatkan atau menghambat kemampuan masyarakat, *Capacity Analysis* memfokuskan analisis empiris tidak hanya pada nelayan skala kecil (secara individu dan kolektif), namun juga pada lembaga-lembaga publik dan swasta yang didirikan untuk menyediakan berbagai barang dan jasa layanan di distrik tersebut. Bukti terbatasnya dukungan yang diberikan para pemangku kepentingan kepada nelayan skala kecil terungkap bahwa : (1) Para pemangku kepentingan mengakui tidak memberikan layanan penyuluhan dan infrastruktur yang memadai dalam usaha pengolahan ikan. (2) Perwakilan dari NGO kurang melakukan upaya yang cukup dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam perencanaan usaha perikanan. (3) Pihak Lembaga Keuangan Mikro tidak membiayai dan mengasuransikan usaha nelayan skala kecil.

Salah satu opsi yang dapat diterapkan ketika merumuskan kebijakan adalah dengan menambahkan sudut pandang para nelayan yang terlibat langsung dalam usaha penangkapan ikan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan agar

kebijakan yang diambil dapat mengadopsi terhadap aktivitas penangkapan ikan para nelayan itu sendiri. Pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem dapat dimasukkan dalam sistem berbasis masyarakat yang menggabungkan aktor-aktor kunci proaktif dan kegiatan perikanan sebagai kegiatan manusia yang berbasis sosial dan budaya pada lingkungan. Keterlibatan pemangku kepentingan harus diterapkan dalam setiap tahap perancangan kebijakan dan pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan perspektif nelayan dalam bisnis penangkapan ikan. Integrasi cara pandang nelayan dapat menjadi tolak ukur kesesuaian kebutuhan nelayan dan keberlanjutan sumber daya perikanan di setiap daerah (Kaya dan Sajriawati, 2023).

2.5. Strategi

Strategi merupakan pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Mintzberg (1998) menyatakan bahwa strategi terbagi atas 5 definisi, yaitu strategi sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi, strategi sebagai taktik (*ploy*), dan strategi sebagai persektif. Strategi digunakan oleh para pemimpin dan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.

David (2009) menyatakan bahwa terdapat 3 tahapan dalam menentukan strategi utama, yaitu: (1) mengumpulkan informasi dasar untuk merumuskan strategi, (2) memunculkan strategi alternatif yang dapat dilaksanakan dengan menggabungkan faktor internal dan eksternal, dan (3) menginput informasi dari tahap 1 untuk mengevaluasi strategi-strategi alternatif yang tertuang pada tahap 2. Hal ini diharapkan dapat memberikan strategi-strategi yang tepat dan objektif.

Menurut Rangkuti (2005), strategi dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis. Strategi manajemen adalah rencana atau tindakan melalui analisis pemanfaatan faktor internal kekuatan, kelemahan, dan faktor eksternal peluang dan ancaman sebuah organisasi.

Rangkuti merumuskan strategi dengan menggunakan pendekatan identifikasi faktor internal dan eksternal, yang dikenal dengan analisis *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *treath* (SWOT).

Keberhasilan penerapan strategi di di lingkungan organisasi bisnis dan organisasi non bisnis khususnya pemerintah didasari oleh hal-hal yang berbeda. Yani (2010) menyatakan bahwa implementasi manajemen stratejik di lingkungan organisasi bisnis didasari oleh nilai-nilai persaingan bebas antar organisasi sejenis melalui pendayagunaan semua sumber yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang bersifat stratejik. Tetapi di lingkungan organisasi non bisnis, seperti pemerintahan, implementasi strategi didasari oleh nilai-nilai pengabdian dan kemanusiaan yang menjunjung kepentingan bersama dan masyarakat, bangsa, dan Negara. Tujuan dari strategi dalam organisasi pemerintahan adalah mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bersama.

Dalam penerapan strategi yang tepat, tidak terlepas dari adanya manajemen strategi. Manajemen strategi ini adalah sebuah proses keseluruhan dari merencanakan, implementasi, serta evaluasi dari strategi dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang. Pentingnya manajemen strategi disebabkan karena: (1) Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi, (2) Memberikan gambaran jelas tentang kepentingan berbagai pihak, (3) Mengantisipasi setiap adanya perubahan secara lebih menyeluruh, dan (4) Menciptakan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam organisasi (Yatminiwati, 2019).

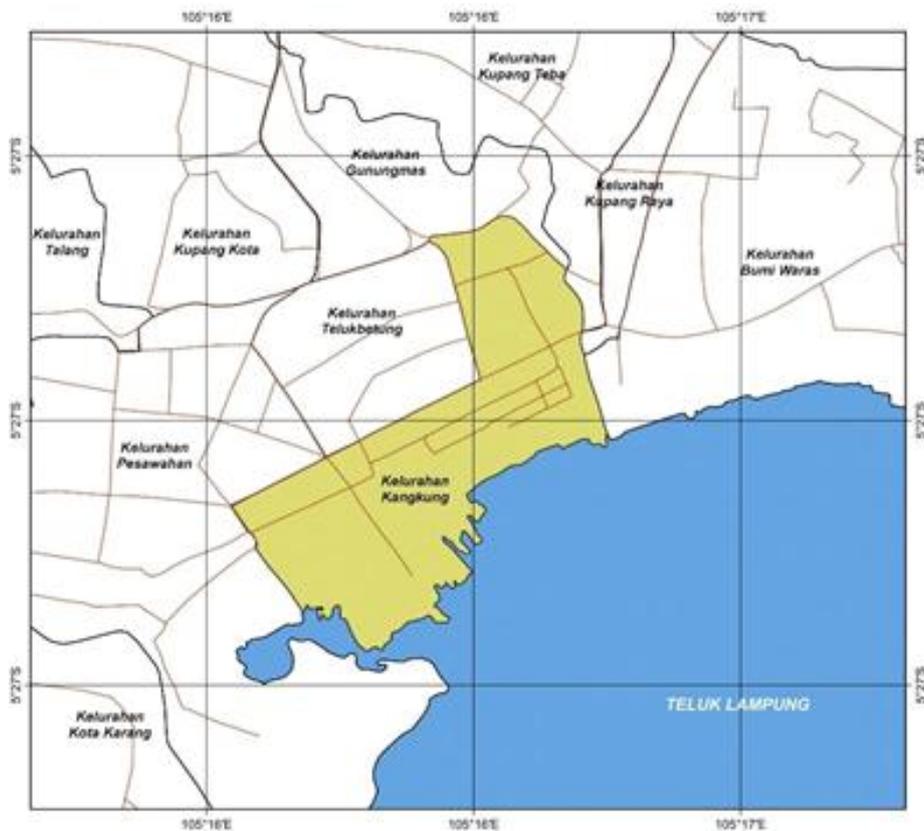
Manfaat dari manajemen strategi yang dikembang oleh Bryson (1995) adalah sebagai berikut: (1) Strategi yang dikembangkan lebih efektif, (2) Memperjelas arah masa depan, (3) Menciptakan prioritas, (4) Membuat keputusan pada masa sekarang dengan mempertimbangkan konsekuensi di masa depan, (5) Membuat landasan yang kokoh bagi pengambilan keputusan, (6) Mengambil keputusan yang melampaui fungsi dan struktur yang ada, (7) Memecahkan masalah pokok yang dihadapi, (8) Memperbaiki kinerja institusi, dan (9) Menangani perubahan lingkungan yang cepat.

Untuk menguji baik atau tidaknya suatu strategi, Rumelt (1997) mengidentifikasi tolok ukur yang dapat digunakan, yaitu *consistency* (sasaran dan kebijakan harus konsisten), *consonance* (merekpresentasikan respon adaptif terhadap lingkungan eksternal dan perubahannya), *advantage* (memberikan peluang terhadap keunggulan yang kompetitif), dan *feasibility* (tidak menggunakan sumber di luar kemampuan dan tidak menghadirkan persoalan yang tidak terpecahkan).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Kungkung, Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan dilaksanakan di Bulan Agustus - November 2024. Peta lokasi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Lokasi Kelurahan Kungkung, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian induktif yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam atas fenomena sosial yang diteliti. Wahyuni Sari (2023) menyebutkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh wawasan tentang sikap, perilaku, sistem nilai, perhatian, motivasi, aspirasi, budaya, atau gaya hidup seseorang atau sekelompok orang dan digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis, penelitian, kebijakan, dan komunikasi. Pendekatan kualitatif ini dapat berdiri sendiri, berdampingan dan melengkapi survei kuantitatif, dan juga digunakan untuk pengembangan penelitian kuantitatif. Studi kasus dalam penelitian ini terfokus pada satu lokus/lokasi atau studi kasus tunggal.

3.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara berikut ini:

a. Wawancara mendalam (*in – dept interview*)

Wawancara dilakukan untuk mengungkapkan data, fakta atau opini yang berada dalam benak informan dan bila dilakukan dengan benar data yang diperoleh kaya dan berkembang (Irawan, 2006).

Kriteria nelayan yang diwawancarai sebagai informan kunci adalah sebagai berikut:

1. Nelayan berdomisili di Kelurahan Kangkung
2. Nelayan sebagai pemilik kapal penangkapan ikan yang menggunakan mesin dengan kapasitas 1-6 GT
3. Nelayan aktif melakukan usaha penangkapan ikan

Adapun pengambilan sampel wawancara mendalam menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan informan kunci sebagai berikut :

Tabel 3. Lembaga dan Perorangan yang Diwawancarai sebagai Informan Kunci

No	Informan Kunci	Jumlah (Orang)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung	1
2	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang	1
3	Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya	1
4	PT Pertamina Patra Niaga	1
5	SPBN PT Pertamina Lempasing	1
6	SPBN PT AKR TPI Lempasing	1
7	Nelayan:	
	- Pengguna BBM Solar	3
	- Pengguna BBM Peralite	3
	Jumlah	12

b. Pengamatan terlibat (*participatory observation*)

Menurut Yin (2015), observasi partisipan adalah observasi khusus yang melibatkan peneliti mengambil peran dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diteliti mulai dari interaksi sosial hingga kegiatan fungsional lainnya. Peneliti memperoleh akses lebih mendalam terhadap obyek penelitian yang kemungkinan tidak sampai kepada penelitian ilmiah umumnya. Dalam penelitian ini obyek pengamatan yang dilakukan adalah proses pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan di SPBN.

c. Studi dokumentasi

Dalam penelitian studi kasus, dokumen memegang peranan yang penting dalam pengumpulan data dan perlu dilakukan peninjauan untuk memahami tujuan dan audiens yang spesifik (Yin, 2015). Studi dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder, termasuk data yang diterbitkan oleh lembaga/instansi pemerintah, peraturan perundangan, serta pendukung lainnya yang diperlukan.

d. *Focus Grup Discussion* (FGD)

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menggali pendapat dan pengalaman *stakeholder* terkait adalah melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Pada awalnya FGD mempunyai definisi metode untuk mengeksplorasi isu atau fenomena khusus dari sekelompok individu terlibat yang berfokus dalam kegiatan bersama

(Kitzinger dan Barbour, 1999). FGD dilakukan dengan mengundang para pemangku kepentingan dalam pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan di Kelurahan Kangkung.

3.4. Analisis Data

Analisis kualitatif sangat berkaitan erat dengan pengumpulan dan interpretasi data untuk mengambil kesimpulan akhir. Oleh karena itu seluruh data hasil wawancara informan kunci dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk membantu dalam penarikan kesimpulan penelitian. Irawan (2006) menjelaskan bahwa pengelolaan data penelitian kualitatif memerlukan sistem pengkodean, penyimpanan, dan pengaksesan data. Sistem pengkodean (*Code System*) berisi daftar kode dengan deskripsi singkat digunakan sebagai label untuk memilah data-data sesuai karakteristiknya.

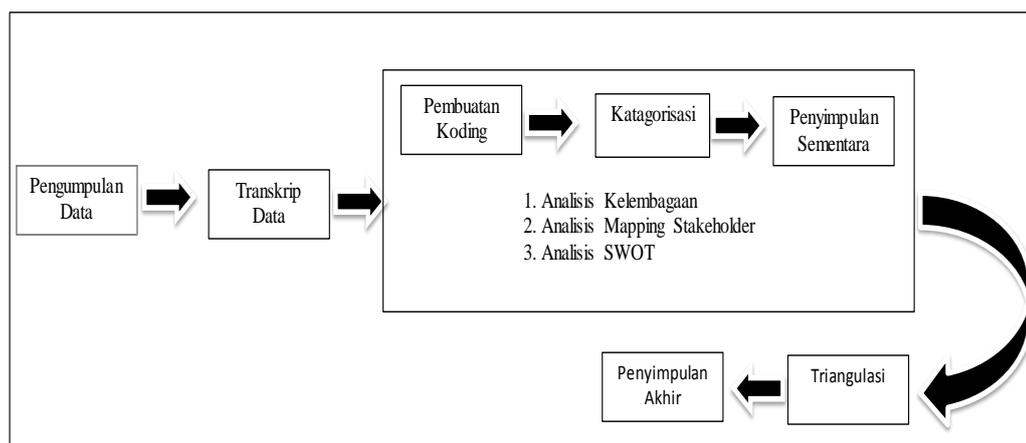
Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan data
Mewawancarai informan kunci, melakukan observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumentasi
- Transkrip data
Mengubah hasil wawancara ke dalam bentuk tertulis
- Pembuatan koding
Menemukan kata kunci dari transkrip data serta memberikan label kode pada setiap kata kunci
- Katagorisasi data
Merangkum kata-kata kunci menurut kategorinya masing-masing, sehingga data akan lebih mengerucut pada beberapa tema/kategori
- Penyimpulan sementara
Kesimpulan ini berdasarkan data yang diperoleh dan bukan merupakan penafsiran peneliti
- Triangulasi
Proses verifikasi informasi dari sumber data/informan yang satu dengan sumber data yang lain

- Kesimpulan akhir

Kesimpulan dapat berupa konseptual ataupun dengan cara mengambil intisari yang dikonversikan menjadi pernyataan dekontekstualisasi.

Data yang dianalisis secara kualitatif kemudian digunakan dalam analisis lanjutan sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian. Analisis data lanjutan dalam penelitian ini menggunakan analisis kelembagaan, analisis *stakeholders mapping*, dan analisis SWOT. Prosedur pembuatan koding, kategori data, dan penyimpulan sementara dalam analisis kualitatif, adalah merupakan bagian dari analisis data lanjutan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan terlibat (*participatory observation*) akan dilakukan pencatatan dengan dengan format yang terdapat dalam lampiran 2. Data observasi ini menjadi data pendukung yang juga akan sangat membantu pengambilan kesimpulan dalam analisis kualitatif.



Gambar 3. Analisis Data Sistem Pengkodean

Sumber: Prosedur Analisis Data Sistem Pengkodean Dimodifikasi dari Irawan (2006)

Analisis data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian, yaitu:

a. Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan bertujuan untuk mengkaji bagaimana institusi (kelembagaan) dalam mengatur perilaku individu dan mengkaji fungsi dari sebuah aturan. Peneliti ingin menganalisis pengaruh aturan-aturan yang berkaitan dengan pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan, terhadap :

- Perilaku dan interaksi para *stakeholder*
- Pelanggaran dan sanksi-sanksi yang ditetapkan
- Hasil dan evaluasi implementasi aturan yang berlaku.

Menurut Ostrom (2006) aturan-aturan yang digunakan (*rules in use*) adalah aturan yang digunakan oleh partisipan untuk membenarkan tindakan yang dilakukan dan keputusan kebijakan akan mempengaruhi struktur situasi. Konsep ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi situasi dan pola interaksi serta hasil dan evaluasi.

b. Analisis *Stakeholder Mapping*

Analisis *stakeholders mapping* menggunakan *Policy Implementation Mapping* dan *Power Versus Interest Grid*. Menurut Eden dan Ackermann (1998) tahapan yang dilakukan dalam adalah sebagai berikut:

b.1. *Policy Implementation Mapping*

Analisis *Policy Implementation Mapping* bertujuan untuk mengidentifikasi strategi selama implementasi program/kebijakan berdasarkan sumber kekuatan *stakeholder*, dengan memahami siapa saja *stakeholder* yang mendukung dan yang menentang.

Tabel 4. *Ethical Analysis Grid Matrix*

Kategori Stakeholder	Kepentingan	Sumberdaya	Channel	Kemungkinan Partisipasi	Tingkat Pengaruh	Implikasi	Action
Potensial Mendukung							
Potensial Menolak							

Sumber: Bryson, 2004.

Keterangan:

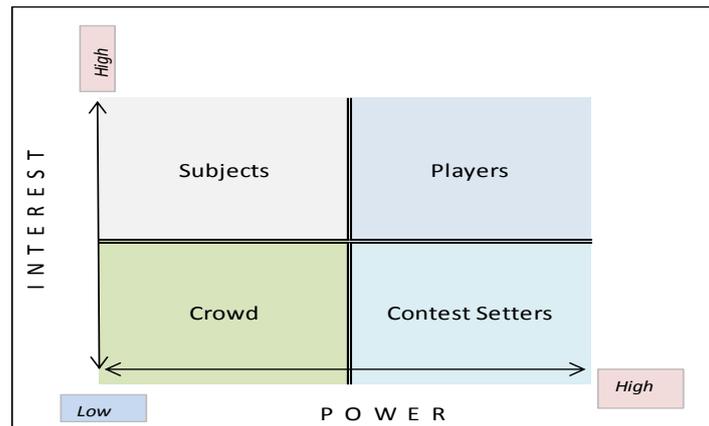
1. Kepentingan yaitu hal hal yang diperjuangkan oleh *stakeholder*
2. Sumberdaya yaitu sarana yang digunakan oleh *stakeholder* guna memperjuangkan kepentingan mereka
3. *Channel* yaitu saluran yang digunakan para *stakeholder* untuk bertindak dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

4. Kemungkinan partisipasi yaitu besarnya kemungkinan mereka akan berpartisipasi atau bersikap terkait dengan kepentingan mereka.
5. Tingkat pengaruh yaitu pengaruh yang akan didapat dari penguasaan sumberdaya atau partisipasi *stakeholder*.
6. Implikasi yaitu implikasi pengaruh *stakeholder* terhadap strategi implementasi kebijakan.
7. *Action* yaitu tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi *stakeholder* dengan pengaruh yang dimiliki.

Menurut Bryson (2004) untuk mempermudah identifikasi dapat digunakan matriks *Ethical Analysis Grid Matrix* dengan memperlihatkan kategori *stakeholder* yang mendukung dan yang menentang pelaksanaan kebijakan. Teknik ini dapat menjelaskan siapa dan hal-hal apa saja yang dianggap etis, sehingga dapat disimpulkan apa yang harus dieliminasi berdasarkan pertimbangan etika tersebut. *Policy Implementation Mapping* menggunakan matriks di bawah ini :

b.2. *Power versus Interest Grid (player, context setters, subject, dan crowd)*

Metode ini bertujuan untuk menyusun strategi tindak lanjut dari sebuah permasalahan yang berfokus kepada *power* dan *interest*. *Power* dapat dinilai dari potensi seseorang dapat mempengaruhi kebijakan, sementara *interest* dinilai dari tingkat keaktifannya terlibat dalam sebuah kebijakan (Eden and Ackermann, 1998).



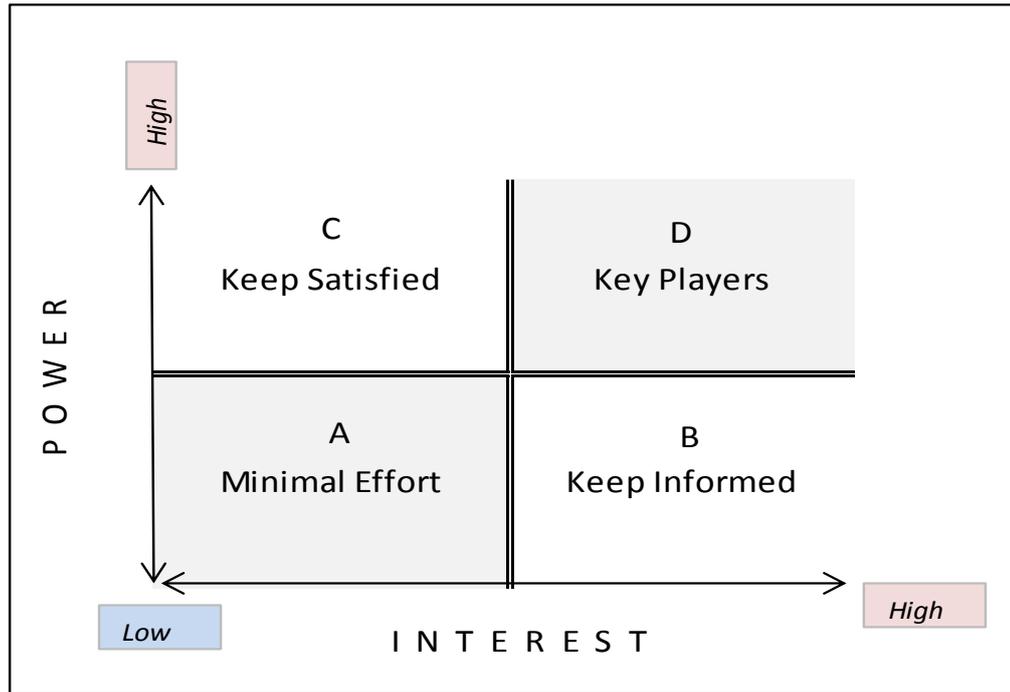
Gambar 4. Kuadran *Power vs Interest Grid* (Bryson, 2004)

Sumber: Bryson, 2004.

Keterangan:

- A. *Crowd* (lemah dalam *power* serta *interest*)
- B. *Context setters* (memiliki *power* akan tetapi hanya memiliki *direct interest* yang kecil)
- C. *Subjek* yaitu *stakeholder* yang memiliki *interest* tapi dengan *power* yang kecil
- D. *Player* yaitu *stakeholder* yang memiliki *power* dan *interest* secara signifikan.

Setelah dilakukan pendataan pemangku kepentingan berdasarkan *Power* dan *Interest*, langkah selanjutnya adalah melakukan menentukan intervensi terhadap stakeholder dengan gambar 5 seperti di bawah ini:



Gambar 5. Jenis Aktor Dalam Setiap Kuadran

Sumber: Eden and Ackerman, 1998

Rekomendasi dirumuskan untuk menetapkan strategi yang akan dilakukan terhadap masing-masing stakeholder dengan potensi yang dimiliki. Rekomendasi untuk setiap *stakeholder* berbeda-beda sesuai letak sektor. Setelah dianalisis potensinya, maka diperoleh strategi sebagai berikut:

- *Stakeholder* di sektor A:
dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang diperlukan
- *Stakeholder* di sektor B:
Dapat menjadi sekutu dalam mendukung kebijakan-kebijakan
- *Stakeholder* C:
Harus mengikuti minat dan potensi dalam kegiatan organisasinya. Tipe seperti ini dapat dilibatkan sesuai dengan kepentingannya
- *Stakeholder* D:
merupakan kunci terpenting dan harus dilibatkan dalam semua kegiatan organisasi.

c. Analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats* (SWOT)

Analisis SWOT adalah metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu: *strengths, weakness, opportunities, dan threats*. Lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman terhadap kelangsungan atau pencapaian tujuan organisasi. Peluang adalah kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan atau mencapai tujuan, sedangkan ancaman merupakan kondisi eksternal yang menimbulkan resiko yang perlu diatasi. Faktor-faktor internal dapat bermanfaat untuk mengetahui keunggulan strategik organisasi atau menghindari ancaman serta titik kelemahan organisasi yang harus dihindari dalam rangka persaingan untuk mencapai tujuan. Faktor kekuatan mencerminkan apa yang telah berjalan dengan baik, sedangkan faktor kelemahan memberikan gambaran aspek yang membutuhkan perbaikan untuk memperbaiki kinerja dan mengurangi resiko.

Matriks SWOT digunakan untuk menetapkan strategi organisasi. Matriks SWOT menghasilkan alternatif strategi dengan mencocokkan faktor eksternal kunci berupa peluang dan ancaman dengan faktor internal kunci yaitu kekuatan dan kelemahan. Analisis lingkungan internal dan eksternal ini merupakan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi strategis yang mempengaruhi efektifitas pendistribusian BBM Subsidi untuk nelayan. Matriks SWOT adalah alat yang sangat penting untuk membantu dalam mengembangkan empat tipe strategi. Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 4 sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan strategi S-T seperti yang dimuat pada Tabel 5.

Rangkuti (2005) menjabarkan matriks SWOT dapat diperoleh dengan 4 alternatif strategi, yaitu:

1. Strategi SO (*Strength – Opportunities*)

Memanfaatkan seluruh kekuatan untuk mengambil peluang

2. Strategi ST (*Strength – Treath*)
Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman
3. Strategi WO (*Weakness – Opportunites*)
Memanfaatkan peluang dengan meminimalisir kelemahan
4. Strategi WT (*Strength Treath*)
Meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman.

Tabel. 5. Matriks Analisis SWOT

Internal	STRENGTH – S Faktor-faktor Kekuatan	WEAKNESS - W Faktor-faktor Kelemahan
Eksternal		
OPPORTUNITIES – O Faktor-faktor Peluang	STRATEGI S-O Gunakan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang	STRATEGI W-O Atasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang
THREATS – T Faktor-faktor Ancaman	STRATEGI S-T Gunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman	STRATEGI W-T Meminimalkan Kelemahan dan menghindari Ancaman

Sumber: Rangkuti, 2005.

Langkah-langkah dalam analisis SWOT untuk menyusun strategi dalam pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan yang dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi hasil wawancara, observasi terlibat, *Focus Group Disscusion* (FGD), dan studi dokumentasi
2. Menentukan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dari sistem pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan di Kelurahan Kangkung, Kota Bandar Lampung
3. Menentukan faktor-faktor eksternal (peluang dan hambatan) dari sistem pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan di Kelurahan Kangkung, Kota Bandar Lampung
4. Menentukan peta posisi kekuatan SWOT (*grand strategy*) dengan EFAS (*External Factor Analysis Strategy*) dan IFAS (*Internal Factor Analysis Strategy*)

5. Menentukan strategi sistem pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan di Kelurahan Kangkung, Kota Bandar Lampung agar dapat terdistribusikan secara tepat.

Untuk menentukan peta posisi kekuatan SWOT (*grand strategy*) maka diperlukan penyusunan matriks EFAS (*External Factor Analysis Strategy*) dengan melakukan pembobotan dan rating pada faktor eksternal (Peluang dan Ancaman). Demikian juga pembobotan dan rating dilakukan terhadap faktor internal IFAS (*Internal Factor Analysis Strategy*).

Berikut ini adalah cara-cara penentuan Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Eksternal (EFAS) seperti tertera pada tabel 6 dan 7:

- a. Menentukan faktor-faktor yang menjadi IFAS dan EFAS dalam pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan
- b. Memberikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00.
- c. Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut kemudian diberi rating atau tingkatan yang menandakan nilai dukungan pengaruh masing-masing faktor dalam pencapaian tujuan pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan dalam jangka waktu pendek. Faktor variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan atau peluang) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat berpengaruh). Kemudian dibandingkan dengan rata-rata variabel yang bersifat negatif (kelemahan atau ancaman) juga diberikan nilai +1 sampai dengan +4 (sangat berpengaruh). Skala untuk pemberian rating dimulai dengan rating 4 (sangat berpengaruh), 3 (berpengaruh), 2 (kurang berpengaruh), dan 1 (tidak berpengaruh) (Yatminiwati, 2019)
- d. Bobot dan rating akan menentukan skor atau nilai dukungan terhadap pencapaian tujuan. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh nilai yang diterakan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor total.
- e. Kolom 5 digunakan untuk memberikan keterangan atau catatan mengapa

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.

- f. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (yang selanjutnya menjadi nilai/titik pada sumbu X) dan pengurangan total faktor O dengan T (yang selanjutnya menjadi nilai/titik pada sumbu Y)
- g. Menghubungkan titik pada sumbu X dan Y menjadi titik koordinat peta posisi organisasi. Berdasarkan peta posisi ini, maka dapat ditentukan strategi apa yang dapat dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan di Kelurahan kangkung agar dapat terdistribusi secara tepat (Gambar 6. Grafik Kuadran Strategi pada Analisa SWOT)

Untuk menentukan bobot dan rating dari masing-masing strategi internal dan eksternal, dilakukan oleh *expert judgement* atau seorang ahli/pakar di bidang kebijakan publik. *Expert judgement* dilibatkan dalam penilaian karena faktor internal seringkali sulit diukur secara objektif dan faktor eksternal bersifat kompleks, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan yang diterapkan. Ahli/pakar diharapkan dapat menganalisis faktor internal dan eksternal lebih akurat dan relevan.

Tabel 6. Faktor Strategi Internal (IFAS)

No	Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating (Nilai 1 sd 4)	Bobot x Rating	Keterangan
I	Kekuatan (S)				
	1.				
	2.				
	3.				
	4. dan seterusnya				
	Jumlah Kekuatan			(Jumlah 1 - 4)	
II	Kelemahan (W)				
	1.				
	2.				
	3.				
	4. dan seterusnya				
	Jumlah Kelemahan			(Jumlah 1 - 4)	
	Kekuatan + Kelemahan	1,00			
	Sumbu X			Jumlah kekuatan (-) Jumlah Kelemahan	

Keterangan:

Penilaian pada bobot:

0,0 (tidak penting) → 1,0 (paling penting)

Penilaian pada rating:

Penilaian pada rating:

1,0 (tidak berpengaruh) → 4,0 (sangat berpengaruh)

Tabel 7. Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

No	Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating (Nilai 1 sd 4)	Bobot x Rating	Keterangan
I	Peluang (O)				
	1.				
	2.				
	3.				
	4. dan seterusnya				
	Jumlah Peluang			(Jumlah 1 - 4)	
II	Ancaman (T)				
	1.				
	2.				
	3.				
	4. dan seterusnya				
	Jumlah Ancaman			(Jumlah 1 - 4)	
	Peluang + Ancaman	1,00			
	Sumbu Y			Jumlah peluang (-) Jumlah ancaman	

Keterangan:

Penilaian pada bobot:

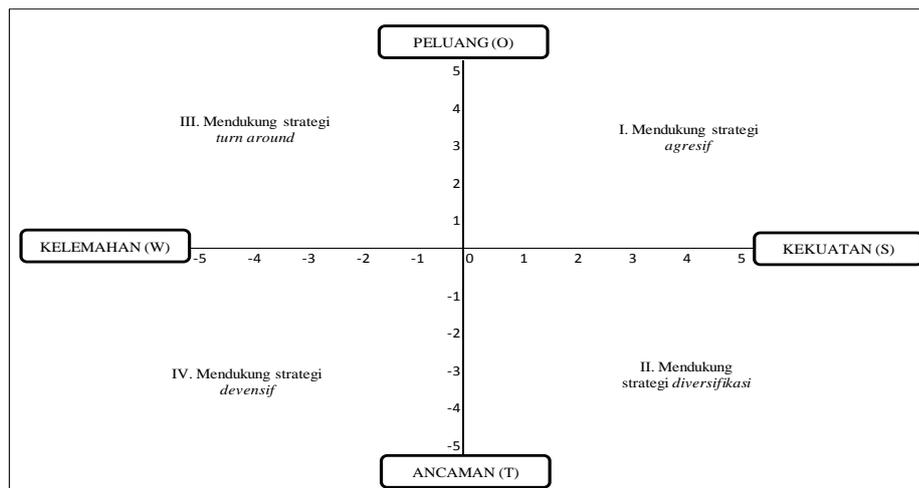
0,0 (tidak penting) → 1,0 (paling penting)

Penilaian pada rating:

Penilaian pada rating:

1,0 (tidak berpengaruh) → 4,0 (sangat berpengaruh)

Kuadran strategi analisa SWOT terbagi dalam 4 kuadran berdasarkan letak posisinya terhadap faktor internal dan eksternal, yaitu: kuadran 1 (mendukung strategi agresif), kuadran 2 (mendukung strategi diversifikasi), kuadran 3 (mendukung strategi *turn around*), dan kuadran 4 (mendukung strategi *defensive*).



Gambar 6. Grafik Kuadran Strategi pada Analisa SWOT

Sumber: Rangkuti, 2005

Keterangan:

a. Kuadran I

Merupakan situasi yang menguntungkan bagi kebijakan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*)

b. Kuadran II

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, kebijakan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi

c. Kuadran III

Kebijakan menghadapi peluang yang sangat, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi kebijakan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik

d. Kuadran IV

Posisi ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, kebijakan tersebut menghadapi berbagai ancaman dari luar dan kelemahan internal. Sehingga strategi yang diterapkan adalah meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Kondisi Geografis

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Propinsi Lampung yang terletak di Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Luas wilayah 197,22 km² terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Bumi Waras berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedamaian, Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panjang, Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara. Kecamatan Bumi Waras memiliki luas wilayah sebesar 4,53 Km². Dengan luas wilayah tersebut Kecamatan Bumi Waras terdiri dari 5 kelurahan yaitu : 1. Kangkung 2. Bumi Waras 3. Bumi Raya 4. Sukaraja 5. Garuntang (BPS Kota Bandar Lampung, 2023).

Sarana pendukung sektor perikanan di Kota Bandar Lampung antara lain Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 3 unit, yaitu Kawasan Lempasing, Lempasing Kota Bandar Lampung, dan TPI Ujung Bom, 2 (dua) unit SPBN di Lempasing (AKR dan Pertamina). TPI Ujung Bom lebih sering disebut Gudang Lelang (BPS, 2024). Gudang Lelang terletak di tepi laut, memiliki pelabuhan sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah difungsikan sejak abad ke-19. Nelayan melakukan aktivitas pelelangan ikan dan dibeli oleh pedagang ikan untuk dijual secara eceran. Komoditas hasil tangkapan

bermacam-macam, yaitu berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, udang, cumi dan berbagai jenis lainnya (Munirwan, 2021).

4.2. Kondisi Demografi

Kecamatan Bumi Waras memiliki luas wilayah sebesar 4,53 km². Dengan luas wilayah tersebut Kecamatan Bumi Waras terdiri dari 5 kelurahan, salah satunya Kelurahan Kangkung. administrasi pemerintahan Kecamatan Bumi Waras pada tahun 2022 terdiri atas 5 kelurahan. Secara total, Kecamatan Bumi Waras terdiri dari 12 Lingkungan (LK) dan 149 Rukun Tetangga (RT). Pengelola usaha perikanan (RTP Perikanan) bidang usaha penangkapan ikan di Kota Bandar Lampung berjumlah 1.322, yang sebagian besar tersebar di Kec. Teluk Betung Timur (462 unit), Bumi Waras (381 unit), dan Kec. Panjang (402 unit), dan sebagian kecil di beberapa kecamatan lainnya. Pada Tahun 2022 Semester 2, penduduk kecamatan Bumi Waras berjumlah 58.349 jiwa dengan sex ratio yaitu 105,67 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. kepadatan penduduk paling besar terdapat di kelurahan kangkung yakni 35.954 jiwa/km² (BPS, 2023).

Shahab (2019) menyatakan bahwa Gudang Lelang secara administratif terletak di Lingkungan III, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pasar Gudang Lelang dikelola oleh KUD Mina Jaya. KUD disahkan dalam badan hukum sebagai koperasi sejak tahun 1981. Mayoritas masyarakat di Gudang Lelang bermata pencaharian sebagai nelayan aktif. Nelayan aktif adalah nelayan yang setiap harinya pergi melaut seperti nelayan buruh yang setiap harinya mereka menangkap ikan di laut. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan penangkapan ikan di laut. BPS (2023) menginformasikan jenis ikan laut yang didapat dari perairan di Bandar Lampung sangat beragam. Dari sekian banyak jenis ikan laut yang berhasil ditangkap di perairan Bandar Lampung, teri menjadi varietas terbesar hingga mencapai 376 ton. Menyusul ikan tongkol dan kurisi di posisi kedua dan ketiga dengan total produksi masing-masing 136 dan 165 ton.

Jumlah nelayan di Kelurahan Kangkung yang terdaftar pada laman satudata.kkp.go.id pada tahun 2023 sebanyak 709 orang. Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan di Kelurahan Kangkung paling besar jumlahnya dibandingkan kelurahan yang berada di pesisir lainnya di Kota Bandar Lampung. Tidak semua nelayan memiliki kapal penangkap ikan, sebagian besar bekerja sebagai buruh nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2023).

4.3. Kondisi Sumber Daya Perikanan

Kota Bandar Lampung secara geografis memiliki garis pantai sepanjang 27,01 km. Meskipun saat ini wilayah laut dalam pengelolaan pemerintah provinsi Lampung, cakupan luas perairan laut di sekitar Kota Bandar Lampung mencapai kurang lebih 48,72 km². Potensi ini menjadi pendorong sebagian penduduk pesisir Kota Bandar Lampung memilih nelayan sebagai profesi sehari-hari. Data jumlah kapal nelayan kecil di Kota Bandar Lampung (<https://statistik.kkp.go.id>) dengan kapal motor tempel sebanyak 267 unit, kapal motor 1 – 5 GT 118 unit, dan kapal motor 5 – 10 GT sebanyak 122 unit, kapal motor 10 – 20 sebanyak 109 unit, dan kapal motor 20 - 30 GT sebanyak 90 unit di tahun 2023. Kapal-kapal nelayan tersebut seluruhnya beroperasi di WPP-RI-572.

Sarana pendukung sektor perikanan di Kota Bandar Lampung antara lain Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 3 unit, yaitu Kawasan Lempasing, Lempasing Kota Bandar Lampung, dan TPI Ujung Bom, 2 (dua) unit SPBN di Lempasing (AKR dan Pertamina). Kecamatan Bumi Waras memiliki luas wilayah sebesar 4,53 km². Dengan luas wilayah tersebut Kecamatan Bumi Waras terdiri dari 5 kelurahan, salah satunya Kelurahan Kangkung (BPS, 2023). Pengelola usaha perikanan (RTP Perikanan) bidang usaha penangkapan ikan di Kota Bandar Lampung berjumlah 1.322, yang sebagian besar tersebar di Kec. Teluk Betung Timur (462 unit), Bumi Waras (381 unit), dan Kec. Panjang (402 unit), dan sebagian kecil di beberapa kecamatan lainnya (BPS, 2023).

Tabel 8. Jumlah Kapal dan Jenis Alat Tangkap Penangkapan di Laut di Kota Bandar Lampung Tahun 2023

No	Kapasitas Kapal (GT)	Jenis Alat Tangkap	Jumlah (Unit)
1	1 - 5 GT	Bagan Berperahu	23
		Bagan Tancap	7
		Bubu	30
		Jaring Insang Kombinasi Dengan Trammel Net	20
		Pancing Ulur	3
		Payang	35
		Jumlah 1 - 5 GT	118
2	5 - 10 GT	Bagan Berperahu	12
		Bubu	37
		Dogol	13
		Jaring Insang Kombinasi Dengan Trammel Net	1
		Pancing Berjoran	8
		Payang	46
		Pukat Cincin Pelagis Besar Dengan Satu Kapal	1
		Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	4
		Jumlah 5 - 10 GT	122
		3	10 - 20 GT
Bagan Tancap	1		
Bubu	12		
Dogol	13		
Pancing Berjoran	8		
Payang	52		
Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal	1		
Jumlah 10-20 GT	109		
4	20 – 30	Bagan Berperahu	79
		Cantrang	9
		Pancing Ulur	2
Jumlah 20-30 GT	90		
Jumlah 1-30 GT			439

Sumber: statistik.kkp.go.id

Kelurahan Kangkung merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bumi Waras dengan luas wilayah hanya mencakup 9% dari luas kecamatan, namun memiliki kepadatan penduduk tertinggi mencapai 35.954 penduduk/km². Jumlah penduduk di Kangkung mendominasi 25% dari jumlah penduduk di Kecamatan Bumi Waras (BPS, 2023). Jumlah nelayan Kangkung yang terdaftar di website satudata.kkp.go.id berjumlah 709 orang yang terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan buruh atau anak buah kapal (ABK). Jumlah nelayan di Kelurahan

Kangkung yang terdaftar pada laman satudata.kkp.go.id pada tahun 2023 sebanyak 709 orang. Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan di Kelurahan Kangkung paling besar jumlahnya dibandingkan kelurahan yang berada di pesisir lainnya di Kota Bandar Lampung. Tidak semua nelayan memiliki kapal penangkap ikan, sebagian besar bekerja sebagai buruh nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2023).

TPI Ujung Bom lebih sering disebut Gudang Lelang (BPS, 2024). Gudang Lelang terletak di tepi laut, memiliki pelabuhan sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah difungsikan sejak abad ke-19. Nelayan melakukan aktivitas pelelangan ikan dan dibeli oleh pedagang ikan untuk dijual secara eceran. Komoditas hasil tangkapan bermacam-macam, yaitu berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, udang, cumi dan berbagai jenis lainnya (Munirwan, 2021).

Shahab (2019) menyatakan bahwa Gudang Lelang secara administratif terletak di Lingkungan III, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pasar Gudang Lelang dikelola oleh KUD Mina Jaya. KUD disahkan dalam badan hukum sebagai koperasi sejak tahun 1981. Mayoritas masyarakat di Gudang Lelang bermata pencaharian sebagai nelayan aktif. Nelayan aktif adalah nelayan yang setiap harinya pergi melaut seperti nelayan buruh yang setiap harinya mereka menangkap ikan di laut. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan penangkapan ikan di laut. BPS (2023) menginformasikan jenis ikan laut yang didapat dari perairan di Bandar Lampung sangat beragam. Dari sekian banyak jenis ikan laut yang berhasil ditangkap di perairan Bandar Lampung, teri menjadi varietas terbesar hingga mencapai 376 ton. Menyusul ikan tongkol dan kurisi di posisi kedua dan ketiga dengan total produksi masing-masing 136 dan 165 ton.

Salah satu permasalahan yang dialami nelayan Kelurahan Kangkung adanya kesulitan mendapatkan BBM subsidi untuk operasional usaha penangkapan ikan. Tentu saja hal ini menjadi kendala yang sangat berarti mengingat bahan bakar minyak merupakan komponen utama biaya operasional nelayan yang mencapai

40% – 65% dari total biaya. Jenis BBM yang digunakan oleh kapal 1-3 GT yaitu jenis Pertalite walaupun ada sebagian yang menggunakan solar. Sedangkan kapal 3–10 GT umumnya menggunakan bahan bakar minyak Tertentu atau Solar. Yuliarti et al., (2023) menginformasikan bahwa selain dari kapasitas kapal, besarnya kebutuhan BBM dipengaruhi oleh jarak dari tempat pendaratan ke daerah penangkapan ikan atau jauhnya daerah perairan yang dijelajahi.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) di Bandar Lampung terdapat 2 unit, yaitu 1 unit yang dikelola oleh PT PERTAMINA dan 1 unit dikelola oleh PT Aneka Kimia Raya (AKR). Kedua stasiun berada di Lempasing, Kelurahan Way Tataan, Kec. Teluk Betung Timur, dengan lokasi terpisah. SPBN PT PERTAMINA dibangun di kawasan UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Provinsi Lampung, sedangkan PT AKR terletak di Dermaga PPI Lempasing Kota Bandar Lampung. Kedua SPBN tersebut dapat dikatakan terkonsentrasi di satu titik dan keduanya menyediakan BBM solar. Kapal-kapal nelayan yang mendaratkan hasil tangkapannya di TPI gudang lelang Kelurahan Kangkung umumnya melakukan pengisian di kedua SPBN tersebut.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendistribusian BBM subsidi bagi usaha nelayan Kelurahan Kangkung masih belum merata. BBM solar subsidi dapat diakses pembeliannya dengan lebih mudah dibandingkan dengan BBM pertalite. BBM solar tersedia pada SPBN yang dikelola PT Pertamina dan PT AKR. Akses pembelian solar oleh nelayan masih terdapat kendala persyaratan administrasi berupa dokumen-dokumen kapal. Peraturan yang diterbitkan pemerintah cukup mendukung dan memihak usaha penangkapan ikan, namun masih sulit diimplementasikan nelayan, terutama dalam pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan. Kebijakan regulasi yang sedang berjalan memerlukan penyempurnaan agar dapat mempermudah kepentingan nelayan dan pemerintah, termasuk mengakomodir fungsi-fungsi pengawasan.
2. *Policy Implementation Mapping* menunjukkan bahwa *stakeholder* secara keseluruhan mendukung implementasi kebijakan pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan dan tidak ada pihak yang menolak. *Stakeholder* utama dalam pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan adalah nelayan dan badan usaha (PT Pertamina Patra Niaga), dan Penyalur (SPBN Pertamina dan AKR). *Stakeholder* pendukungnya adalah BPH Migas, DKP Kota Bandar Lampung, Kantor KSOP dan KUD Mina Jaya. *Stakeholder player* pada pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan yaitu, BPH Migas dan Badan Usaha (PT Pertamina Patra Niaga, SPBN PT Pertamina, dan SPBN PT AKR). Rekomendasi yang diberikan pada *stakeholder* ini adalah kolaborasi membangun kemitraaan yang strategi, penyediaan sumber daya dan perangkat

teknis, membangun komunikasi yang aktif, terbuka, transparan, menerapkan konsep *reward and punishment*, serta pemantauan, pengawasan dan evaluasi.

3. Hasil analisis SWOT terhadap instansi DKP Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa peta posisi kuadran terletak pada kuadran I yaitu mendukung strategi agresif. Adanya penerapan strategi agresif, melalui kekuatan yang ada pada dinas saat ini, dapat mewujudkan pencapaian penyelenggaraan pendistribusian BBM subsidi secara tepat di Kota Bandar Lampung.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Nelayan kecil di Kelurahan Kangkung lemah dalam memenuhi dokumen persyaratan untuk mengakses BBM. Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat bekerja sama dengan instansi terkait menyediakan fasilitasi pelayanan dokumen persyaratan tersebut di lokasi sentra nelayan.
2. DKP Kota Bandar Lampung sudah sangat perlu untuk melakukan kerjasama dengan pihak SPBU untuk memenuhi kebutuhan BBM nelayan jenis pertalite yang masih sulit diakses dan BBM solar bagi nelayan yang tidak berada di sekitar SPBN.
3. DKP Kota Bandar Lampung dapat memulai koordinasi dengan KKP untuk menjajaki kemungkinan menyelenggarakan pengukuran kapal perikanan dengan menggunakan personil KKP di daerah untuk wilayah Kota Bandar Lampung. Kemungkinan lain yang dapat dipertimbangkan yaitu menggunakan SDM PNS pemerintah setempat untuk diperbantukan dalam tugas dimaksud.
4. Berdasarkan kinerja SPBN PT AKR yang masih rendah dalam pelayanannya kepada nelayan, maka PT AKR perlu untuk mengevaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap strategi pelayanan pendistribusian BBM, strategi

pemasaran, terutama evaluasi kepuasan pelanggan yang dalam hal ini adalah nelayan, serta kualitas BBM yang disediakan.

5. Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memfasilitasi nelayan untuk pengadaan bahan bakar alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. 2015. Telaah kebijakan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia. *Kajian*. 20(2): 145–162.
- Aguion, A., Ojea, E., Florez, L.G., Cruz, T., Garmendia, J.M., Davoult, D., Queiroga, H., Rivera, A., Fernandez, J.L.A., Macho, G.M. 2021. Establishing a governance threshold in small-scale fisheries to achieve sustainability. *Ambio*. 51: 652–665. DOI: 10.1007/s13280-021-01606-x
- Ananda, G. 2022. Asas Keseimbangan dalam perjanjian kerjasama perusahaan BBM antara PT Pertamina (Persero) dengan mitra SPBU. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. 6(4): 2730-2735. DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3937.
- Amarullah, T., Zuraidah, S., Gazali, M. 2020. Strategi peningkatan pendapatan nelayan skala kecil berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi gurita (*Octopus sp*) di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. *Jurnal Perikanan Tropis*. 7(1): 13-25.
- Ardianti, N.D., 2023. Kewenangan Pengukuran Kapal Perikanan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Fakultas Hukum. Universitas Pancasakti. Tegal.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2024*. BPS Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id>. Diakses pada 20 Mei 2024.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Kota Bandar Lampung*. BPS Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id>. Diakses pada 17 Januari 2024.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Statistik Daerah Kota Bandar Lampung*. BPS Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id>. Diakses pada 17 Januari 2024.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kecamatan Bumi Waras dalam Angka*. BPS Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id>. Diakses pada 17 Januari 2024.

- Barbour, R. S., Kitzinger, J. 1999. *Developing Focus Group Research: Politics, Theory and Practice*. Sage Publications. Los Angeles. DOI: 10.4135/9781849208857.
- Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. 2024. Jalur Distribusi BBM dari Produksi ke Konsumen. www.bphmigas.go.id. Diakses pada 10 Oktober 2024.
- Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. 2024. Koordinasi Pengawasan Eksternal BBM Subsidi. www.bphmigas.go.id. Diakses pada 20 Juni 2024.
- Bryson, J.M. 1995. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization*. Jossey-Bass. San Fransisco.
- Bryson, J.M. 2004. *What to Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs. University of Minnesota. Minneapolis.
- Budiharsana, M.P., Heywood, P.F. 2017. *Analisis dan Pengembangan Kelembagaan*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Jakarta.
- Darma, S., Caisar, D., Darma, Permandi, Y., Hakim, Pusriadi, T. 2020. Improving Fishermen's Welfare with Fuel-Saving Technology. *Journal of Asian Scientific Research*. 10(2): 105-120. DOI: 10.18488/jurnal.2.2020.102.105.120
- David, R.J., Pamela, S. 2019. *Institutional Theory in Organization Studies*. Department of Management, Laval University. Oxford Research Encyclopedias. Oxford. DOI: 10.1093/acrefore/9780190224851.013.158
- David, F.R. 2009. *Strategic Managements: Concepts and Cases*. Pearson Prentice Hall. New Jersey.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. 2024. Alur Prosedur Pembuatan E-Pas Kecil. <https://uppmaccinibaji.org/informasi-prosedur-layanan/>. Diakses pada 20 Juli 2024.
- Dwitasari, C., Kurniawan, S. 2024. Penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu secara online sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di UPTD TPI Kota Probolinggo. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*. 1(3): 47-53. DOI: 10.62017/arima.
- Eden, C., Ackermann, F., 1998. *Making Strategy: The Journey of Strategic Management*. Sage Publication. London.
- Fadhillah, N & Thahir, M.A. 2022. Fuel recommendation information system (BBM) case study: ministry of marine, fisheries and food of Nagan Raya Regency. *Asian Journal of Aquatic Sciences*. 5(1): 20-25. DOI: 10.31258/

- Falah, M.H., Aptasari, F.W. 2023. *Tantangan Koperasi Nelayan sebagai Penyeimbang Rezim Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Indonesia*. Penerbit BRIN. Jakarta. DOI: 10.55981/brin.908.
- Farhan Y. 2022. Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (KUSUKA) Policy Brief: Reformasi Belanja Subsidi BBM untuk Akses Nelayan Kecil. Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran. <https://policycommons.net/artifacts/3124758/reformasi-belanja-subsidi-bbm-untuk-akses-nelayan-kecil/3917977/>. Diakses pada 21 Maret 2024.
- Febryano, I.G., Supono, Damai, A.A., Hardian, D., Winarno, G.D., Tresiana, N. 2021. Cantrang: a dilemma in policy implementation case in Lampung Bay, Indonesia. *Problemy Ekorożwoju – Problems of Sustainable Development*. 16(1): 133-142. DOI: 10.35784/pe.2021.1.14.
- Finance.detik.com. 2023. Polisi Bongkar Dugaan Penyelewengan BBM Bio Solar di Lamtim. <https://6detik.com/nasional/12145/polisi-bongkar-dugaan-penyelewengan-bbm-bio-solar-di-lamtim/>. Diakses 8 Mei 2024.
- Fitria, D., Pratama, E.S., Yuniarti, N., Pertiwi, D.E., Hernandianto. 2023. Pengaruh kenaikan harga dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terhadap pendapatan nelayan di Desa Ketapang Baru Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3): 575-584. DOI: 10.53697/emak.v4i3
- Gobel, R.K., Laksmono, B.S., Huseini, M., Siscawati, M. 2024. Equity and Efficiency: an Examination of Indonesia's Energy Subsidy Policy and Pathways to Inclusive Reform. *Sustainability 2024*, 16(407): 1-26. DOI: 10.3390/su16010407
- Grati, F., Azzuro, E., Pemindaian, M., Tasseti, A.N., Bolognini, L., Guicciardi, S., Vitale, S., Scannella, D., Carbonara, P., Dragiyeviy, B., Ikica, Z., Palluqi, A., Marjeta, B., Ghmati, H., Turki, A., Cherif, M., Bdiou, M., Jarboui, O., Benhadjhamida, N., Mifsud, J., Milone, N., Ceriola, L., Arneri, E. 2022. Mapping small-scale fisheries through a coordinated participatory strategy. *Fish and Fisheries*. 2022(23): 773–785. DOI: 10.1111/faf.12644.
- Hasly, I.R.J., Setiawan, D. 2022. Policy Brief: Akses dan ketersediaan bahan bakar minyak subsidi untuk nelayan tradisional skala kecil. Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). <https://seknasfitra.org/akses-bbm-bersubsidi-nelayan-kecil-dan-nelayan-tradisional-di-indonesia/>. Diakses pada 14 April 2024.
- Husni, S., Nursan, M. 2023. Studi sosial ekonomi perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Sumbawa Barat. *Agroteksos*. 33(1): 209-218.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial..* Universitas Indonesia. Jakarta.

- Kaya, I.R.G., Sajriawati. 2023. Common thread for adaptive management planning of small-scale fishermen needs versus government policy in South Papua, Indonesia. *Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology*. 17: 82-87. DOI: 10.47577/technium.v17i.10050
- Kitzinger, J., Barbour, R. S. 1999. *Developing Focus Group Research: Politics, Theory and Practice*. Sage Publications. New York. DOI: 10.4135/9781849208857
- Maani, K.Dt., Fajri, H., Wahyuni, N., Malau, H. 2021. Collaborative governance sebagai solusi dalam tata kelola pemberdayaan nelayan. *Sosio Informa*. 7(02): 73-88. DOI: 10.33007/inf.v7i2.2713.
- Mazigo, A.F., Hattingh, J.P. 2020. Using insights in sen's capability approach to overcome design and execution challenges in empirical development ethics research. *Nord J Appl Ethics*. 14(1): 45–65. DOI: 10.5324/eip.v14i1.3311.
- Mintzberg, H. 1998. *The Strategy Process*. Prentice Hall. New Jersey.
- Munirwan, H., Nurzukhrufa, A., Septiandiani, F., Islami, C.D. 2021. Identifikasi karakteristik ruang bersama pada permukiman nelayan untuk optimalisasi peremajaan permukiman dengan konsep co-living (Studi Kasus: Kelurahan Kangkung, Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3): 1258-1263. DOI 10.33087/jiubj.v21i3.1722.
- North, C.D. 1991. Institutions. *The Journal of Economic Perspectives*. 5(1): 97-112.
- Ostrom, E. 2011. Background on the Institutional Analysis and Development Framework. *The Policy Studies Journal*. 39 (1): 7-27.
- Paramuditha, H.R.R. 2024. Implications of pertamini fuel prices on fulfilling the government's commitment in setting fuel prices in Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*. 5(2): 4502-4510.
- Pejovich, S. 1999. The Effects of the interaction of formal and informal institutions on social stability and economic development. *Journal of Markets and Morality*. 2 (2): 164 – 181.
- Picaulima, S.M., Notanubun, J., Kilmanun A.D. 2022. Penyuluhan mengenai keberlanjutan usaha perikanan tangkap skala kecil berdasarkan aspek ekonomi di Ohoi Ohoidertawun, Kabupaten Maluku Tenggara. *Buletin Udayana Mengabdi*. 21(4): 308-313.
- Pramoda, R., Apriliani, T. 2019. Kajian hukum kebijakan ukuran kapal dalam definisi nelayan kecil. *Kebijakan Sosek KP*. 9(2): 143-156. DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7499.

- Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press. Surakarta.
- Prasutiyon, H., Ma'arif, A.A.A. 2019. Penghematan bahan bakar penangkapan ikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan XIV Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia*. Universitas Hang Tuah. Surabaya. 61-72.
- Priyanto, W. 2021. Kepastian hukum penyaluran dan ketersediaan BBM subsidi untuk nelayan di Kec. Soropia, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal IUS Civile*. 5(1): 112-131. DOI: 10.35308/jic.v5i1.2681.
- Putra, B.M., Ardiansah., Kadaryanto, B. 2021. Tinjauan normatif penjualan BBM subsidi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*. 2(1): 57-66. DOI: 10.46730/japs.v2i1.41.
- Rangkuti, F. 2005. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C.H., Stringer, L.C. 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Manajement*. 90(5): 1933-1949. DOI: 10.1016/j.jenvman.2009.01.001.
- Risdiyanta. 2014. Membedah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. *Forum Teknologi*. 4(3): 42-52.
- Risi, D., Vigneau, L., Bohn, S., Wickert, C. 2022. Institutional theory-based research on corporate social responsibility: *Bringing Values Backin International Journal of Management Reviews*. 1-21. DOI: 10.1111/ijmr.12299.
- Rumelt., Richard, P. 1997. *Good Strategy Bad Strategy*. Crown Business. London.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2024. Nelayan Terdaftar dalam Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA). <https://satudata.kkp.go.id>. Diakses 11 Juli 2024.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2024. Jumlah Kapal Perikanan Laut. https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/jumlah_kapal/tbl-statis. Diakses pada 01 Agustus 2024.
- Schmid, A.A. 2004. *Conflict and Cooperation. Institutional and Behavioral Economics*. Blackwell Publishing. Oxford.

- Shahab, S.A.K.A. 2019. *Solidaritas Sosial Masyarakat Nelayan di Pasar Gudang Lelang, Kec. Bumi Waras, Kelurahan Kungkung, Kota Bandar Lampung*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya. Palembang
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Veronica, A., Usman, M. 2023. Dampak perubahan harga subsidi (BBM) terhadap pendapatan nelayan (Studi Kasus: Dusun Kapuran, Kota Agung, Tanggamus). *Journal on Education*. 06(01): 8835-8841. DOI: 10.31004/joe.v6i1.4368.
- Villasante, S., Tubío, A., Gianelli, I., Pita, P., Allut, A.G. 2021. Ever changing times: sustainability transformations of galician small – scale fisheries. *Frontiers of Marine Science*. 8: 1-19. DOI: 10.3389/f.mars.2021712819.
- Wahyuni, S. 2023. *Riset Kualitatif: Strategi dan Contoh Praktis*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Wulandari, Pratikto, R., Dewi, E, 2023. Evaluasi kebijakan subsidi bahan bakar minyak solar untuk nelayan kecil. *Jurnal Kebijakan Publik*. 14(1): 13-22.
- Yani, A.T. 2010. Mengakrabi manajemen stratejik: solusi memberdayakan organisasi secara komprehensif. *Jurnal Ilmu Administratif*. 7(3): 167-182.
- Yatminiwati, M. 2019. *Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan bagi Mahasiswa*. Widyagama Press. Jawa Timur.
- Yin, R.K. 2015. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Yuliarti, I., Panggabean, R., Farida, H.L., Gulo, A.S., 2023. Analisis kebijakan dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk nelayan. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Sakman)*. 3(1): 1-8. DOI: 10.35912/sakman.v3i1.1667.
- Zulham, A., Pramoda, R., Shafitri, N. 2022. Pengorganisasian nelayan skala kecil di zona penangkapan ikan perikanan industri dalam mendukung rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 8(2): 89-1-101. DOI: 10.15578/marina.v8i2.11043.